GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SAMBUTAN

Puji dan syukur yang tak terhingga patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan berkat-Nya, maka kita bersama telah menjalani karya pengabdian melewati satu tahun pemerintahan dalam kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013 yang dipercayakan oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTT yang pertama di daerah ini.

Selanjutnya patut kami berikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pimpinan SKPD, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan serta segenap rakyat NTT yang telah memberikan dukungan selama satu tahun kepemimpinan kami sehingga kita dapat melewatinya dengan berbagai catatan penting yang telah atau sedang kita laksanakan saat ini untuk terus melangkah ke depan.

Kami menyadari bahwa tahun pertama kepemimpinan kami dalam pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan yang baru sebagai penjabaran visi dan misi, tentu masih membutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Namun dengan tekad dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing yang dilandasi spirit baru pembangunan dengan motto "sehati sesuara membangun NTT baru", dan paradigma baru penganggaran pembangunan yaitu "Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah)", telah membawa pengaruh positif dalam pembangunan tahun 2009. Untuk meningkatkan pencapaian target-target RPJMD 2008-2013, masih dibutuhkan komitmen yang lebih baik disertai kesadaran untuk melakukan perubahan secara lebih nyata dari para penyelenggara pembangunan di daerah ini. Atas dasar itu, maka penerbitan

buku Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dimaksudkan untuk memberikan gambaran nyata kepada masyarakat mengenai pencapaian target agenda pembangunan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Disamping itu juga sebagai bahan evaluasi dan umpan balik terhadap proses pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan ruang keterbukaan bagi masyarakat untuk menilai, mengawasi dan mengawal seluruh proses pembangunan yang sedang berlangsung di daerah ini.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mempunyai rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam membangun bumi Flobamora tercinta. Keterlibatan semua pihak, baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat secara simultan dan sinergis pada setiap tingkatan melalui tugas dan perannya masing-masing.

Dalam rentang waktu satu tahun, kami sadar bahwa program/kegiatan yang sudah dan sedang berjalan tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Namun Pemerintah Provinsi NTT terus mengupayakan tercapainya target program/kegiatan, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan paradigma "Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah)". Melalui paradigma tersebut maka struktur belanja pembangunan dari APBD maupun APBN selama lima tahun secara konsisten akan lebih dititikberatkan dan didorong pada proporsi belanja publik lebih besar dibandingkan dengan belanja aparatur, sehingga aksesibilitas pelayanan dan akselerasi pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Satu tahun sudah kami bekerja dengan dukungan semua pihak . Dua belas bulan adalah waktu yang singkat untuk melihat suatu perubahan besar. Namun tiga ratus enam puluh hari cukup untuk merajut harapan dan menumbuhkan optimisme dan melangkah ke depan dengan kerja keras, cerdas dan tuntas untuk meraih masa depan yang lebih baik. Melewati satu tahun kepemimpinan dengan bermodalkan kepercayaan seluruh rakyat NTT dan berbagai stakeholder daerah ini, kedepan kita pasti lebih bersinergis membangun NTT baru yang kita harapkan.

Akhirnya kami memohon doa dari segenap masyarakat NTT dalam mengemban tugas pelayanan di bidang kepemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terus mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah dan masyarakat NTT.

Kiranya Tuhan senantiasa memberkati karya dan pengabdian kita sekalian.

Kupang, 31 Juli 2009

Gubernur Nusa Tenggara Timur,	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur,
DRS. FRANS LEBU RAYA	**IR. ESTHON L. FOENAY, M.Si**

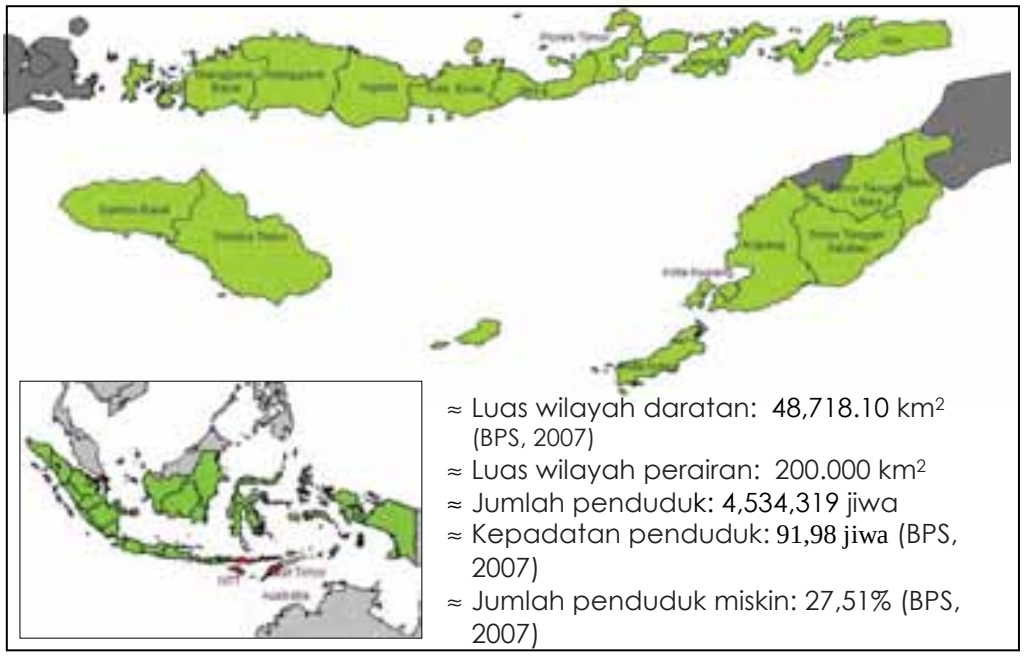

≈ Luas wilayah daratan: 48,718.10 km^2 (BPS, 2007)
≈ Luas wilayah perairan: 200.000 km^2
≈ Jumlah penduduk: 4,534,319 jiwa
≈ Kepadatan penduduk: 91,98 jiwa (BPS, 2007)
≈ Jumlah penduduk miskin: 27,51% (BPS, 2007)
≈ PDRB rill per kapita: 2.748.530 (BI, 2009)
≈ Jumlah kabupaten/kota: 20 kabupaten

1. Letak dan Luas Wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di sebelah selatan katulistiwa pada posisi $8^0 – 12^0$ Lintang Selatan dan $118^0 – 125^0$ Bujur Timur. Batas-batas wilayah; sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Negara Republic Timor Leste dan sebelah barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau, 246 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Diantara pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar, yaitu Flores, Sumba, Timor dan Alor (FLOBAMORA) selebihnya adalah pulau-pulau kecil yang letaknya tersebar, antara lain: Adonara, Babi, Lomblen, Pamana Besar, Panga Batang, Parmahan, Rusa, Samhila, Solor (Kabupaten Flotim/Lembata), Pulau Batang, Kisu, Lapang, Pura, Rusa, Trweng (Kabupaten Alor), Pulau Dana, Doo, Landu Manifon, Manuk, Pamana, Raijna, Rote, Sarvu, Semau (Kabupaten Rote Ndao), Pulau Loren, Komodo, Rinca, Sebabi Sebayur Kecil, Sebayur Besar Serayu Besar (Kabupaten Manggarai), Pulau Untelue (Kabupaten Ngada), Pulau Halura (Kabupaten Sumba Timur), dll. Dari seluruh pulau yang ada, 42 pulau telah berpenghuni sedangkan sisanya belum berpenghuni.

Hampir semua pulau di wilayah NTT terdiri dari pegunungan dan perbukitan kapur. Dari sejumlah gunung yang ada terdapat gunung berapi yang masih aktif. Di pulau Flores, Sumba dan Timor terdapat kawasan padang rumput (savana) dan stepa yang luas.

Luas wilayah daratan 48.718,10 km^2 (2,49% luas Indonesia) dan luas wilayah perairan ± 200.000 km^2 diluar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Secara rinci luas wilayah daratan menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

IBUKOTA KABUPATEN/KOTA DAN
LUAS WILAYAH MASING-MASING KABUPATEN

NO	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	LUAS (Km^2)	PROSEN TERHADAP NTT
1	Kupang	Sulamu	5,434.76	11%
2	Timor Tengah Selatan	S o E	3,947.00	8.10%
3	Timor Tengah Utara	Kefamenanu	2,669.70	5%
4	B e l u	Atambua	2,445.60	5.02%
5	A l o r	Kalabahi	2,864.60	5.88%
6	Flores Timur	Larantuka	1,813.20	3.72%
7	S i k k a	Maumere	1,731.90	3.55%
8	E n d e	Ende	2,046.50	4.20%
9	N g a d a	Bajawa	1,645.88	3.38%
10	Manggarai	Ruteng	2,096.44	4.30%
11	Sumba Timur	Waingapu	7,000.50	14.37%
12	Sumba Barat	Waikabubak	2,183.18	4.48%
13	Lembata	Lewoleba	1,266.00	2.60%
14	Rote Ndao	Rote Ndao	1,280.00	2.63%
15	Manggarai Barat	Labuan Bajo	2,397.03	4.92%
16	Nagakeo	Mbay	1,416.96	2.91%
17	Sumba Tengah	Waibakul	1,868.74	3.84%
18	Sumba Barat Daya	Wetabula	1,480.46	3.04%
19	Manggarai Timur	Borong	2,642.93	5.42%
20	Sabu Raijua	Seba	460.54	0.95%
21	Kota Kupang	Kupang	26.18	0.05%
		NUSA TENGGARA TIMUR	48,718.10	100%

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

2. Wilayah Administratif

Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 20 Kabupaten dan 1 Kota yang terbagi dalam 285 Kecamatan, 2.533 Desa dan 303 Kelurahan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

JUMLAH KABUPATEN, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	KEL	DESA + KEL
1	Kupang	24	160	17	177
2	Timor Tengah Selatan	32	228	12	240
3	Timor Tengah Utara	24	140	34	174
4	B e l u	24	196	12	208
5	A l o r	17	158	17	175
6	Flores Timur	18	209	17	226
7	S i k k a	21	147	13	160
8	E n d e	20	191	23	214
9	N g a d a	9	78	16	94
10	Manggarai	9	132	17	149
11	Sumba Timur	22	140	16	156
12	Sumba Barat	6	45	8	53
13	Lembata	9	137	7	144
14	Rote Ndao	8	73	7	80
15	Manggarai Barat	7	116	5	121
16	Nagakeo	7	84	16	100
17	Sumba Tengah	4	43	-	43
18	Sumba Barat Daya	8	94	2	96
19	Manggarai Timur	6	104	10	114
20	Sabu Raijua	6	58	5	63
21	Kota Kupang	4	-	49	49
	JUMLAH	285	2533	303	2836

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, 2009.

3. Iklim

Wilayah Nusa Tenggara Timur beriklim kering yang dipengaruhi oleh angin musim. Periode musim kemarau lebih panjang, yaitu 7 bulan (Mei sampai dengan Nopember) sedangkan musim hujan hanya 5 bulan (Desember sampai dengan April). Suhu udara rata-rata 27,6^{0}c, suhu maksimum rata-rata 29^{0}c dan suhu minimum rata-rata 26,1^{0}c.

4. Tanah

a. Ketersediaan Lahan

Dari keseluruhan luas daratan (48.718,10 km^2), yang dapat digarap ± 1.529.000 km^2 (37,3%) sedangkan 63,7% sisanya merupakan lahan kritis, kawasan hutan dan lain-lain. Tata guna lahan (1996) mencakup :

- sawah 3,11% (147.127 ha)
- lahan kering 96,89% (4.587.863 ha) terdiri dari :
  - ladang/huma/tegalan 13,34% (633.641 ha)
  - kolam 6,02% (1.112 ha)
  - perkebunan 5,52% (261.498 ha)
  - padang rumput 14,70% (674.638 ha)
  - lain-lain 63,71% (3.016.744 ha)

b. Kesesuaian Lahan

Pulau Timor, terdiri dari 6 (enam) zona agroekologi :

- lahan berlereng > 40% (171.400 ha) cocok untuk konservasi/ tanaman keras.
- zona berlereng 16–40% (770.000 ha) cocok untuk perkebunan dan hortikultura buah.
- zona berlereng 8–15 % ketinggian di atas 750 m dpl cocok untuk agroforestry dan kacang-kacangan (tanaman crop)
- zona berlereng s.d. 8%, drainase baik, ketinggian kurang dari 750 m dpl, cocok untuk agroforestry dan kacang-kacangan
- zona berlereng s.d. 8%, drainase buruk cocok untuk persawahan (45.000 ha)
- lahan pesisir 12.695 ha, cocok untuk hutan bakau dan tambak.

Pulau Sumba, terdiri dari 6 (enam) zona agroekologi :

- lahan berlereng > 40% (460.315 ha) cocok untuk konservasi/ tanaman keras.
- zona berlereng 16–40% (168.750 ha) cocok untuk perkebunan.
- zona berlereng 8–15% ketinggian di atas 750 m dpl (22.970 ha) cocok untuk tanaman semusim.
- zona berlereng s.d. 8%, drainase baik, ketinggian kurang dari 750 m dpl (237.815 ha), cocok untuk tanaman semusim dan padang penggembalaan.
- zona berlereng < 3%, drainase buruk (20.945 ha) cocok untuk persawahan.
- zona pesisir 3.435 ha, cocok untuk hutan penyangga pantai dan usaha tambak.

Pulau Flores, terdiri dari 6 (enam) zona agroekologi :

- lahan berlereng > 40 % (742.730 ha) cocok untuk konservasi/ tanaman keras.
- zona berlereng 16 - 40 % (168.750 ha) cocok untuk tanaman perkebunan.
- zona berlereng 8 - 15 % (11.744 ha) ketinggian di atas 750 m dpl cocok untuk tanaman jagung dan kacang hijau
- zona berlereng s/d 8 % (155.388 ha) dengan ketinggian kurang dari 750 m dpl, cocok untuk pertanian tanaman semusim.
- zona pesisir (18.135 ha), drainase buruk, cocok untuk hutan penyangga pantai dan usaha tambak.
- zona berlereng < 3 % , drainase buruk (29.433 ha) cocok untuk persawahan.

5. Flora dan Fauna

F l o r a

Selain jenis tumbuhan yang telah dibudidayakan oleh penduduk, seperti tanaman padi, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, sayur-mayur, buah-buahan, kelapa, cengkeh, vanili, jambu mente, kapas, kapuk, kemiri, asam, dll juga terdapat jenis tumbuhan di kawasan hutan seperti kayu akasia, kayu putih, kayu cendana, kayu lontar, kayu gaharu, dll. Dari sekian banyak jenis tumbuhan kayu ini yang paling terkenal adalah kayu cendana yang memiliki kualitas yang lebih baik dibanding kayu cendana yang ada di wilayah lainnya di Indonesia.

F a u n a

Jenis fauna yang ada di wilayah ini dan sudah diternakkan, antara lain kuda, sapi, kerbau, kambing, berbagai jenis unggas, disamping itu terdapat binatang liar yang hidup di kawasan hutan seperti rusa, babi hutan, kerbau liar, kuda liar. Satu jenis binatang purba yang hanya ada di wilayah ini dan tidak terdapat di daerah lain di dunia adalah Komodo.

6. Bahan Tambang

Dari hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Provinsi NTT, telah terinventarisir 47 jenis mineral yang terdiri dari 3 jenis mineral bahan galian golongan A (Nikel, Timah & Batubara), 7 jenis bahan galian golongan B (Emas, Tembaga, Mangan, Pasir Besi, Besi, Timbal/timah hitam dan Barit) serta 37 jenis bahan galian golongan C.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk NTT tahun 2008 tercatat sebanyak 4,534,319 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.256.609 (49,77%) dan perempuan 2.277.710 (50,23%). Laju pertumbuhan penduduk 1,79% per tahun dengan kepadatan penduduk 78 jiwa per km^2.

NO	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL PENDUDUK
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	Kupang	193,180	50.32	190,716	49.68	383,896
2	Timor Tengah Selatan	218,455	52.27	199,487	47.73	417,942
3	Timor Tengah Utara	107,601	50.48	105,552	49.52	213,153
4	B e l u	211,893	48.00	229,558	52.00	441,451
5	A l o r	90,303	50.03	90,184	49.97	180,487
6	Flores Timur	110,038	47.01	124,038	52.99	234,076
7	S i k k a	134,787	48.38	143,841	51.62	278,628
8	E n d e	110,671	46.48	127,456	53.52	238,127
9	N g a d a	65,866	49.37	67,540	50.63	133,406
10	Manggarai	256,353	50.06	255,712	49.94	512,065
11	Sumba Timur	118,663	51.97	109,688	48.03	228,351
12	Sumba Barat	567,743	53.27	49,781	46.73	106,524
13	Lembata	49,239	46.32	57,073	53.68	106,312
14	Rote Ndao	59,348	51.95	54,888	48.05	114,236
15	Manggarai Barat	101,518	49.19	104,849	50.81	206,367
16	Nagakeo	60,476	48.38	64,514	51.62	124,992
17	Sumba Tengah	31,348	52.10	28.825	47.90	60,173
18	Sumba Barat Daya	136,084	52.10	125,127	47.90	261,211
19	Manggarai Timur	Data masih tergabung di Kabupaten Induk (Manggarai)				
20	Sabu Raijua	Data masih tergabung di Kabupaten Induk (Kupang)				
21	Kota Kupang	144,044	49.17	148,878	50.83	292,222

NO	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL PENDUDUK
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	
	NUSA TENGGARA TIMUR	1,256,609	49.77	2,277,710	50.23	4,534,319

Sumber : BPS Provinsi NTT.

Komposisi penduduk NTT menurut kelompok umur membentuk semacam piramid, dimana proporsi terbesar berada pada kelompok umur termuda dan terus mengecil pada kelompok umur yang lebih tua sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

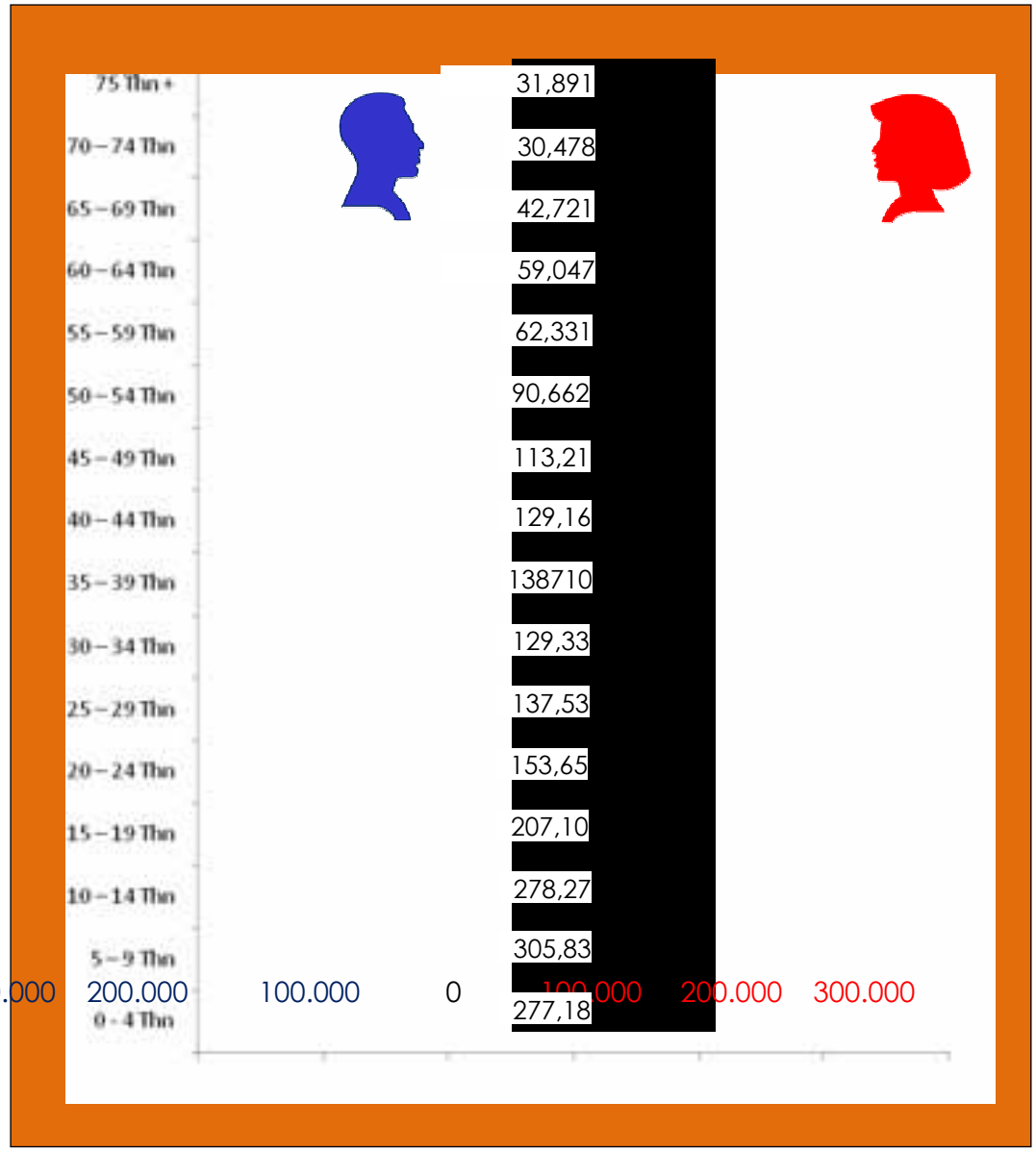

Sumber : BPS Provinsi NTT.

2. Ketenagakerjaan

Kelompok usia kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas. Kelompok usia kerja ini dibedakan menjadi kelompok Angkatan Kerja dan kelompok Bukan Angkatan Kerja. Kelompok angkatan kerja adalah mereka yang bekerja atau mencari pekerjaan, sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga, sekolah, cacat, jompo, dll.

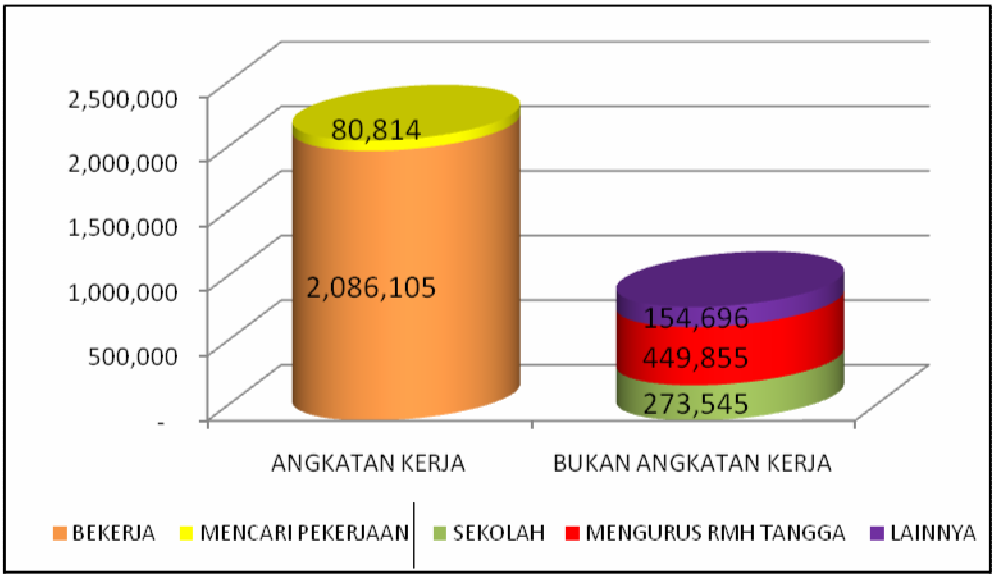

Sumber : BPS Provinsi NTT.

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI NTT

KETERANGAN	2006	2007	2008
PENDUDUK USIA KERJA	**2.753.967**	**2.810.310**	**3.045.015**
Angkatan Kerja	**2.047.931**	**2.087.368**	**2.166.919**
- Bekerja	1.973.187	2.009.643	2.086.105
- Tidak Bekerja	74.744	77.725	80.814
Bukan Angkatan Kerja	**706.036**	**722.942**	**878.096**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	79,45%	74,36%	74,28%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,46%	3,65%	3,72%

Sumber : BPS Provinsi NTT.

Sosial Budaya

Kebudayaan daerah Nusa Tenggara Timur banyak dipengaruhi oleh budaya suku-suku bangsa lain di Indonesia seperti Jawa, Bugis Makassar, Ambon serta pengaruh bangsa asing seperti Portugis dan Belanda pada zaman dahulu yang masuk melalui jalur perdagangan dan politik. Kesemuanya itu mencipta-kan keanekaragaman budaya yang dimiliki masyarakat NTT, seperti yang nampak dalam bahasa, sistem pemerintahan (dahulu) sistem religi dan unsur-unsur budaya lainnya. Walaupun demikian masyarakat NTT masih tetap menampakkan ketradisionalannya yang menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh suku-suku di daerah lain.

Pada abad ke-13 dapat dipastikan bahwa di daerah Nusa Tenggara Timur sudah ada sistem pemerintahan yang teratur dibawah pimpinan seorang raja. Hal ini terbukti dari pemberitaan *Chan Yu Khua* dalam *Chu Fan Shih* bahwa Timor telah mengirimkan utusannya ke Jawa pada tahun 1225 M. Diketahui pula bahwa pada masa itu di Jawa telah ada kerajaan Majapahit. Kemudian terjadilah hubungan dagang dan politik antara kedua belah pihak. Maka tak heran apabila di Nusa Tenggara Timur dapat ditemukan beberapa bentuk pengaruh kebudayaan Jawa, seperti Mythe Majapahit di pulau Sabu dan Pantar; tarian Lendo Maja, dan upacara untuk Majapahit di pulau Sabu; pemakaian nama Jawa sebagai nama keluarga di pulau Sabu. Selain itu dalam bahasa daerah terdapat istilah atau kata *Usi* atau *Usif* yang diduga berasal dari kata *Gusti.*

Suku Bugis Makassar yang terkenal sebagai pelaut juga menampakkan pengaruhnya di Nusa Tenggara Timur. Hal ini terbukti dengan adanya *Perjanjian Bongaya* yang terjadi pada sekitar abad ke-17 bahwa beberapa tempat di Flores dan Timor diakui sebagai daerah dibawah pengaruh *Kerajaan Goa.* Pengaruh suku Bugis Makassar nampak menonjol di daerah Flores, Solor, Alor dan Pantar yang nampak dari cara berpakaian,

terutama kaum wanitanya. Pakaian wanita Flores nampak seperti pakaian tradisional Bugis Makassar dengan baju *Bodo*-nya.

Masyarakat NTT pada dasarnya memiliki sifat yang taat, utuh, setia, dinamis dan patuh. Keinginan untuk maju cukup besar, namun bersifat "tertutup", karena masih dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama. Mereka sukar untuk menyampaikan permasalahannya kepada siapa saja yang tidak atau belum dikenal.

A g a m a

Lima agama besar; Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha hidup dan berkembang di Nusa Tenggara Timur sejak berabad-abad lampau Kemajemukan agama terjadi karena masuknya agama-agama tersebut melalui jalur perdagangan. Proses pengembangan dan penyebaran agama-agama berlangsung dalam suatu rentang waktu yang cukup panjang, sehingga terjadi pertautan antara agama yang satu dengan yang lainnya dan telah terjalin persatuan dan kerukunan antar umat beragama yang tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilakukan bersama. Selain agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha, di daerah tertentu masih terdapat masyarakat yang menganut agama animis seperti Jingtiu di Sabu, Halaik di Rote dan Merapu di Sumba.

Secara umum kondisi kehidupan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur berjalan cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah berkembangnya agama-agama di Nusa Tenggara Timur pada zaman dahulu. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Nusa Tenggara Timur telah menjadi wilayah pengembangan Missie Katolik dan Zending Kristen Protestan serta sedikit Islam, sedangkan Agama Hindu hadir di Wilayah Nusa Tenggara Timur sesudah kemerdekaan.

Kontribusi dari Agama-agama:

Secara historis, Missie Katolik dan Zending Kristen Protestan, telah banyak menyumbangkan hasil karyanya, terutama di bidang pendidikan dan sosial ekonomi umat. Peranan Umat Islam dan Hindu saat ini juga sudah terlihat di bidang yang sama. Etos Agama; Paham iman-amal, dari agama-agama, sebagai spirit-motivasi yang menggerakkan pelaksanaan program Pembangunan Nusa Tenggara Timur.

Kelembagaan Agama-agama:

Kelembagaan Agama-agama berstruktur, berjenjang dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa-desa, dikendalikan langsung oleh pejabat masing-masing Agama. Adapun Majelis Keagamaan yang ada di Nusa Tenggara Timur menurut agama adalah sebagai berikut:

- Katolik: KWALIP NTT dengan 6 Keuskupan (Kupang, Atambua, Larantuka, Ende, Manggarai Waetabula)
- Protestan : PGI, DPI, PII
- Islam : Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- Hindu : Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)

PERSENTASE PEMELUK AGAMA MENURUT GOLONGAN AGAMA

Prosesi Keagamaan "Jumat Agung" di Larantuka

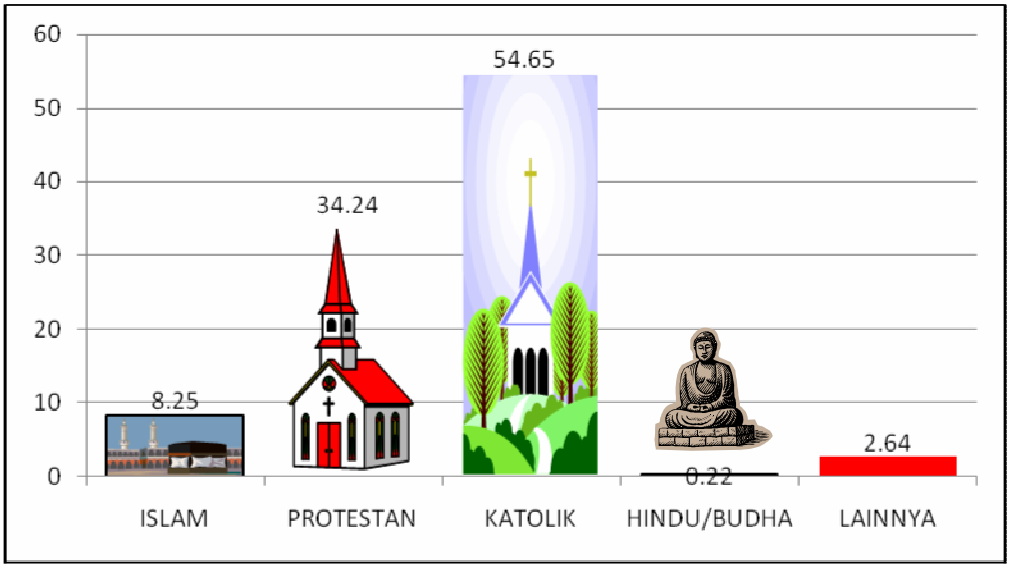

Sumber : Provinsi NTT Dalam Angka 2007, BPS Provinsi NTT.

Sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang politik, kemajuan pembangunan di bidang ini telah menunjukan hasil yang menggembirakan melalui proses demokratisasi. Pelaksanaan demokratisasi yang paling signifikan adalah proses pemilihan umum (Pemilu).

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu telah merepresentasikan beberapa indikator pembangunan bidang politik, yaitu institusionalisasi partai politik, peningkatan partisipasi politik, suksesi pemerintahan dan kepemimpinan nasional/daerah, legitimasi representase politik, perwujudan penghargaan hak-hak warga negara dan pematangan lembaga penyelenggara Pemilu.

Penyelenggaraan demokratisasi di daerah juga berlangsung dalam perhelatan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam tahun 2008 telah berlangsung Pilkada di 10 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sikka, Sumba Tengah, Kupang, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Belu, Nagekeo, Alor, Sumba Barat Daya dan Manggarai Timur.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap Pemilu cukup besar. Khusus pada Pemilu Legislatif tahun 2009 dari 2.758.359 pemilih yang ada dalam DPT 2.061.281 orang (74,73%) menggunakan hak pilihnya, sementara 697.078 orang (25,27%) tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan.

Pada Pemilu anggota legislatif tahun 2009 jumlah Partai peserta Pemilu di Provinsi NTT sebanyak 38 partai dan yang memperoleh kursi di DPRD hanya 18 partai. Jumlah anggota DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu tahun 2009 sebanyak 55 orang yang berasal dari partai: HANURA 5 orang, PKPB 3 orang, PPRN 1 orang, GERINDRA 6 orang, PKS 1 orang, PAN 1 orang, PKB 1 orang, PPI 1 orang, PKP 1 orang, PPDI 1 orang, PDK 1 orang, PRN 1 orang, PP 1 orang, GOLKAR 11 orang, PPP 1 orang, PDS 3 orang, PDIP 9 orang, DEMOKRAT 7 orang.

Dari perspektif *gender,* komposisi anggota DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu tahun 2009 adalah 42 orang laki-laki (94,55%) dan hanya 3 orang perempuan (5,45%). Hal ini tetap menjadi perhatian kedepan agar jumlah keterwakilan perempuan di DPRD sesuai dengan yang diharapkan.

Perolehan suara dan jumlah kursi di DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu legislatif tahun 2009 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

PEROLEHAN SUARA DAN JUMLAH KURSI DI DPRD PROVINSI NTT
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009

NO	NAMA & NO URT PARTAI	JUMLAH SUARA	WAKIL DI DPRD		
			LAKI2	PEREMPUAN	JUMLAH
1	**1** PARTAI HATI NURANI RAKYAT	96.906	5	-	5
2	**2** PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	53.463	2	1	3
3	**4** PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	47.362	1	-	1
4	**5** PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	106.327	6	-	6
5	**8** PARTAI KEADILAN SEJAHTRA	37.745	1	-	1
6	**9** PARTAI AMANAT	50.373	1	-	1

NO	NAMA & NO URT PARTAI	JUMLAH SUARA	WAKIL DI DPRD		
			LAKI2	PEREMPUAN	JUMLAH
	NASIONAL				
7	**13** PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	45.878	1	-	1
8	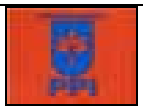 **14** PARTAI PEMUDA INDONESIA	25.080	1	-	1
9	**17** PARTAI KARYA PERJUANGAN	33.518	1	-	1
10	**19** PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	38.642	1	-	1
11	**20** PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	46.888	1	-	1
12	**21** PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	51.461	1	-	1
13	**22** PARTAI PELOPOR	34.554	1	-	1
14	**23** PARTAI GOLONGAN KARYA	391.792	11	-	11
15	**24** PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	30.393	1	-	1

NO	NAMA & NO URT PARTAI	JUMLAH SUARA	WAKIL DI DPRD		
			LAKI2	PEREMPUAN	JUMLAH
16	**25** PARTAI DAMAI SEJAHTRA	68.982	2	1	3
17	**28** PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	237.252	8	1	9
18	**31** PARTAI DEMOKRAT	191.946	7	-	7
		JUMLAH	**52**	**3**	**55**

Sumber: KPUD NTT

Gubernur NTT - Frans Lebu Raya dan Ibu Lusia, saat pencontrengan Pileg – 2009.

Wakil Gubernur NTT – Eston Foenay dan Ibu Wely saat pencontrengan Pileg – 2009.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembangaunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

1.1. VISI

Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, adil dan demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Nusa Tenggara Timur yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, memperhatikan keseimbangan antara kewajiban dan hak, menghargai pendapat dan menerima pendapat orang lain.

Berkualitas.

Mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatakn kualitas Sumber Daya Manusia NTT yang diukur berdasarkan perbaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), angka Buta Aksara serta Tingkat Partisipasi Sekolah, Usia Harapan Hidup Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk.

Sejahtera.

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapitan penduduk NTT yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan ketersedianaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi di NTT

Adil .

Mengandung makna pembangunan Kesamaan hak dalam hukum dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan yang berdampak

pada terjadinya pemerataan distribusi dan akses terhadap sumberdaya dan hasil-hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat NTT.

Demokratis.
Mencerminkan keterwakilan proses dan sustansi agenda-agenda pembangunan yang dilakukan secara rasional dan obyektif dengan mempertimbangan aspek keterbukaan, partisipasi publik dan kesamaan dengan demikian menjamin adanya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabel sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Dalam Bingkai Negara Republik Indonesia.
Mengandung makna bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan tahun 2008-2013 adalah:

a **Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat**.
Melalui misi ini pemerintah ingin meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat baik yang di kota mapun di desa dengan meningkatkan fasilitas pelayanan pendidikan baik jumlah, kualitas terutama penyebarannya, namun perluasan kesempatan belajar ini dibarengi pula dengan relevansi jenis dan jenjang pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga perluasan pendidikan dimaksud dapat efektif dan efisien.

b **Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat.**
Melalui misi ini pemerintah ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat, pemerataan pelayanan kesehatan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas gizi masyarakat yang tiap tahunnya terus melanda NTT dan berdampak pada penuruanan kualitas sumber daya manusia.

c **Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal.**
Melalui misi ini pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan penduduk yang saat ini cukup memprihatinkan akibat masih tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya

pendapatan perkapita, meningkatnya angka pengangguran, belum berkembangnya sektor riil serta rendahnya pertumbuhan dan produktivitas UMKM dan Koperasi. Untuk itu perkonomian NTT yang saat ini masih mengandalkan sektor-sektor tradisonal harus juga memperhatikan sektor-sekor non tradisional seperti industri juga tersier khususnya jasa-jasa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

d **Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.**

Melalui misi ini pemerintah memandang peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perekonomian, sangat bergantung pada kelayakan infrastruktur pembangunan yang ada. Untuk itu dalam lima tahun kedepan, pemerintah akan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur baik dalam jumlah, kualitas serta penyebarannya terutama sarana dan prasarana air dan listrik, transportasi darat, laut dan udara, pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur perumahan dan permukiman .

e **Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka menjelmakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum.**

Melalui misi ini pemerintah Provinsi NTT ingin menata dan membina hukum tingkat daerah serta pemerintah ingin menempatkan supremasi hukum sebagai landasan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan mengedepankan norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat.

f **Meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.**

Melalui misi ini pemerintah ingin menunjukkan pentingnya penanganan masalah penataan ruang yang merupakan salah satu matra dalam perencanaan pembangunan daerah, serta masalah lingkungan hidup yang erat kaitanya dalam mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari.

g **Meningkatkan akses perempuan dan anak dalam sektor publik, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak**.

Sudah menjadi komitmen Pembangunan Nasional juga Dunia untuk memperhatikan kualitas hidup serta perlindungan

perempuan dan anak, untuk itu melalui misi ini pemerintah ingin meningkatkan perlindungan dan kualitas hidup perempuan dan anak melalui peningkatan akses perempuan dan anak dalam sektor publik serta meningkatnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

h **Mempercepat penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah kepulauan, dan pembangunan daerah rawan bencana alam**.
Melalui misi ini pemerintah daerah menekankan pada percepatan penanggulangan masalah yang mendasar pada masyarakat NTT umumnya dan masyarakat desa khususnya yakni masalah kemiskinan dengan sejumlah retetan ikutannya. Selain itu NTT juga hampir setiap tahun tertimpa petaka bencana alam sehingga harus ada upaya penanggulangan secapat mungkin agar masyarakat tidak harus terlalu menderita. Selain itu wilayah NTT yang merupakan wilayah kepulauan perlu adanya strategi tersendiri dibandingkan dengan daeah daratan yang lebih mudah dijangkau, hal ini ditambah lagi dengan posisi NTT yang juga menjadi daerah perbatasan dengan Negera lain seperti Timor Leste dan Australia yang rawan terhadap masalah-masalah lintas batas termasuk penyelundupan.

2. Strategi dan Arah Pembangunan

2.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2008-2013, yaitu "**Terwujudnya masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera, adil dan demokratis, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**".

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka pemerintah melaksanakan 8 (delapan) misi pembangunan daerah yang akan ditempuh melalui 4 (empat) **STRATEGI POKOK PEMBANGUNAN DAERAH**, yaitu:

2.1.1. Pembangunan Daerah yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan.

Pembangunan daerah yang **berkesinambungan** diarahkan untuk melanjutkan program pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. Program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan modifikasi sesuai dengan kemajuan jaman dan tuntutan masyarakat. Pembangunan daerah yang **berkelanjutan** diarahkan agar pembangunan daerah mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat bagi generasi sekarang dan bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

2.1.2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTT dalam segala aspek terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

2.1.3. Percepatan Pembangunan Daerah dengan Mengembangkan Ekonomi Lokal.

Diarahkan untuk pengembangan ekonomi lokal (*local economic development*), yaitu dengan mengembangan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah untuk meningkatkan derajat kemajuan ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi ini yang tepat diharapkan mampu menemukenali dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing (*knowledge based economy*) sekaligus berbasis sumber daya lokal (*resource based economy*) baik melalui

pemerintah daerah, sektor swasta dan kelembagaan/organisasi yang berbasis masyarakat setempat.

2.1.4. Pemberdayaan Masyarakat.

Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Komitmen untuk pemberdayaan masyarakat ini dituangkan sampai pada konsekuesi anggaran pembangunan yang berpihak pada masyarakat dengan konsep **Anggaran untuk Rakyat menuju Sejahtera** (**ANGGUR MERAH**)

2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

2.2.1. **Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan**

Untuk mencapai sasaran Pembangunan tahun 2008-2013, maka arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan adalah:

a. Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu

b. Meningkatkan kompetensi lulusan sesuai strandar yang ditetapkan, peningkatan kualifikasi akademis dan profesionalitas tenaga kependidikan yang memadai, mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih berkualitas

c. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran, penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja

d. Mengembangkan kurikulum yang berwawasan global sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik,

e. Meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional dan internasional, mendorong lulusan yang memiliki kualifikasi kemampuan dasar yang baik untuk melanjutkan studi maupun untuk terjun ke masyarakat serta mendorong lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang ketrampilan generis.

f. Menyempurnakan manajemen pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi oleh standar pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat.

g. Mendorong sistem pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada manajemen berbasis sekolah, meningkatkan efisiensi pendidikan, meningkatkan jumlah sekolah yang berorientasi pada asas pemerataan, keadilan dan demokratisasi pendidikan.

h. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

i. Menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (*relapse illiteracy*), dan menciptakan masyarakat belajar, menurunkan

perbedaan gender pada semua jenis dan jenjang pendidikan serta Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh kabupaten/kota untuk memenuhi hak dasar masyarakat.

j. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/ keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya

2.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan

Untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2013, kebijakan pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada:

a. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Desa Siaga.

b. Pemenuhan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit.

c. Penggalakan kembali kampanye Keluarga Berencana

d. Perbaikan kualitas manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

e. Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas.

f. Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin.

g. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, perbaikan pola distribusi pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

h. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

i. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

j. Pengembangan jaringan kerjasama antar daerah dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan terutama masalah kesehatan lintas wilayah.

k. Pengembangan kegiatan penelitian sebagai masukan dalam

perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi

Untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2013, maka kebijakan pembangunan bidang ekonomi terutama diarahkan pada:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan bagi semua komponen angkatan kerja.

b. Meningkatkan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana diklat yang memadai, mendorong angkatan kerja agar memiliki kemauan yang kuat dari dalam diri agar memiliki kemauan untuk bekerja keras, berkorban dan melayani.

c. Menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya yaitu dengan a) Perlindungan dan dukungan bagi pengembangan lembaga keuangan mikro. b) Revitalisasi dan perluasan usaha perkebunan, perikanan dan peternakan. c) Pengembangan usaha di luar pertanian (off farm) di perdesaan. d) Perluasan usaha di kawasan pesisir dan daerah tertinggal. e) Penguatan Usaha Koperasi, dan Usaha Mikro dan Kecil. f) Penguatan Lembaga Keuangan Mikro. g) Pengembangan industri yang menyerap tenaga kerja. h) Pembangunan infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja.

d. Memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi.

e. Memperluas unit usaha sektor industri yang mempunyai pengganda kesempatan kerja.

f. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi, pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum.

g. Mendorong terbentuknya informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja dan meningkatkan kerjasama antara lembaga bursa kerja dan perusahaan/lembaga.

h. Untuk merevitalisasi institusi ekonomi, kebijakan pembangunan diarahkan untuk pertama, merevitalisasi balai latihan tenaga kerja. Kedua, revitalisasi kelembagaan koperasi. *Ketiga*, revitalisasi balai penyuluh pertanian/nelayan, *Keempat*, revitalisasi kelembagaan pendamping sarjana masuk desa untuk meningkatkan produktivitas petani/nelayan. *Kelima*, revitalisasi lumbung desa. *Keenam*, revitalisasi BUMDes dan KAPET, pengembangan pendidikan dan latihan tenaga kerja. *Ketujuh*, revitalisasi industri kecil dan menengah melalui penelitian dan pengembangan komoditas unggulan, penguatan kemitraan dan kerjasama dengan usaha kecil dan mikro, dan koperasi dengan swasta. Penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap modal, informasi, prasarana dan sarana, teknologi dan pasar.

i. Pengembangan produk unggulan daerah berbasis klaster dan pemberdayaan ekonomi lokal

j. Peningkatan kemampuan ketahanan pangan masyarakat NTT.

k. Konservasi lahan dan pengembangan produk hasil hutan secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan.

l. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan daerah sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan.

m. Diversifikasi produk, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras.

n. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan.

o. Reorientasi pengelolaan usaha tani melalui pengembangan agribisnis dengan tetap mengutamakan peningkatan kesejahteraan petani, pencegahan konversi lahan pertanian produktif.

p. Pengawasan dan pengamanan jalur distribusi dan perdagangan dari berbagai tindak kriminal, pemerasan dan pungutan liar; meningkatkan promosi dan kerjasama UMKM dan perdagangan nasional/ internasional dengan melibatkan secara langsung pelaku usaha kecildan mikro, dan koperasi.

2.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur tahun 2008-2013 maka arah kebijakan pembangunan bidang infrastruktur adalah:

a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik dan membuka isolasi fisik antar daerah melalui pembangunan jalan, jembatan, dermaga, bandar udara dan terminal

b. Mengupayakan ketersediaan alat angkutan untuk mempermudah pendistribusian barang dan jasa, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan di daerah perdesaan terutama yang menghubungkan pusat kegiatan usaha kecil dan menengah, dan koperasi dengan ruas jalur utama distribusi dan pusat perdagangan.

c. Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana yang tersedia untuk mempertahankan dan menggerakkan sektor unggulan daerah.

d. Meningkatkan upaya keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.

e. Meningkatkan dan mendorong pembangunan prasarana air, irigasi, embung dan bendungan ke arah tersedianya pelayanan yang berbasis masyarakat.

f. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga terutama di wilayah rawan kekeringan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya.

g. Penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

h. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berimbang; mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana

kesehatan; Meningkatkan bantuan pelayanan dan pembangunan rumah ibadah yang merata di daerah bagi peningkatan kualitas kehidupan umat beragama; memberdayakan dan memperbaiki fasilitas olahraga untuk meningkatkan pembinaan olahraga

i. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan; mengembangkan sarana dan prasarana untuk menuju program desa mandiri energi listrik dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.

j. Mengembangkan prasarana pemasaran, mengembangkan pasar desa sebagai upaya merangsang berkembangnya pemasaran produksi petani, peternak, nelayan dan pengrajin; mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

k. Meningkatkan pembangunan perumahan rakyat; menata dan memperbaiki permukiman masyarakat.

l. Konsolidasi/ resettlement permukiman/ transmigrasi; melakukan penghijauan di daerah tangkapan air dan Wilayah Aliran Sungai; dan meningkatkan kualitas pelayanan prasarana & sarana lingkungan terutama pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan.

m. Meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan milik) bagi masyarakat berpendapatan rendah, menciptakan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran, mengembangkan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian bagi buruh/karyawannya; meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah dalam penyediaan lahan, sumber pembiayaan dan prasarana dan sarana lingkungan; dan mengembangkan kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan dalam rangka upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja;

n. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

o. Mengemfbangkan lembaga yang bertanggungjawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman pada semua tingkatan pemerintahan serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif;

mendukung terbentuknya peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pendukung pengembangan perumahan; meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan bangunan; dan menciptakan kepastian hukum dalam bermukim.

p. Mengoptimalkan koordinasi pembangunan lintas kewenangan pemerintahan dan antar pemangkukepentingan, terutaman dalam pelaksanaan program dan penganggaran pembangunan.

2.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Hukum dan Keadilan, Politik dan Pemerintahan

Untuk mencapai sasaran pembangunan Hukum dan Keadilan Tahun 2008-2013, maka arah kebijakan pembangunan bidang Hukum dan HAM adalah:

a. Mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan, pelaksanaan dan penegakkan hukum, meningkatkan fungsi institusi-institusi lokal sebagai wahana partisipasi hukum masyarakat

b. Revitalisasi lembaga penegak hukum yang berorientasi pada perlindungan hukum pada masyarakat dan melakukan refungsionalisasi institusi-institusi penegak hukum agar dapat berperan secara optimal,

c. Penguatan kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan, menyempurnakan berbagai produk hukum yang represif dan meningkatkan kualitas Peraturan Daerah dan produk-produk hukum lainnya dengan pendekatan partisipatif.

d. Peningkatan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia, memberdayakan masyarakat untuk memelihara kamtibmas.

e. Menertibkan administrasi pemerintah agar berorientasi pada pelayanan masyarakat, menata struktur birokrasi dan meningkatkan disiplin aparatur.

f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

g. Menciptakan iklim yang kondusif agar proses politik dapat berjalan secara demokratis.

2.2.6. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai sasaran pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2008-2013, maka arah kebijakan pembangunan bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup adalah:

a. Menyeralaskan kebijakan penataan ruang Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota;

b. Melakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT, sesuai dengan regulasi dan kondisi terkini;

c. Memantapkan konsolidasi terhadap produk hukum, dokumen rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kawasan dan rencana teknis tata ruang kawasan agar lebih komprehensif dan sinergis dan sejalan dengan kecenderungan perubahan yang terjadi,

d. Menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah kedalam Rencana Detail Kawasan dan Rencana Teknis Kawasan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah,

e. Mensosialisasikan produk hukum dan rencana tata ruang yang telah ada;

f. Mensinergikan dan mengoptimalkan pemanfaatan rencana tata ruang dengan rencana sektoral,

g. Meningkatkan peran penegakan hukum dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta kesesuaian antara status kepemilikan lahan dengan arahan rencana tata ruang;

h. Mengotimalkan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

i. Mengembangkan sistem informasi tata ruang untuk kepentingan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.2.7. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2008-2013 maka arah kebijakan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda adalah:

a. Memperkuat kelembagaan pemberdayaan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

b. Meningkatkan koordinasi, dan memperkuat jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

c. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

d. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.

e. Memperkuat kelembagaan dan organisasi kepemudaan dalam rangka meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan meningkatkan prestasi pemuda di bidang olah raga.

f. Meningkatkan kualitas dan partsipasi pemuda dalam pembangunan

g. Meningkatkan Kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda

h. Peningkatan budaya dan prestasi olah raga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat;

i. Meningkatkan pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga unggulan

j. Peningkatan pemberdayaan organisasi olah raga;

k. Peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olah raga

2.2.8. Arah Kebijakan Pembangunan Agenda Khusus

a. **Penanggulangan kemiskinan**, kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk:

1. **Perluasan kesempatan** yaitu menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
2. **Pemberdayaan kelembagaan masyarakat** yaitu dengan memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
3. **Peningkatan kapasitas** yaitu mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan dan teknologi.
4. **Perlindungan sosial** untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

5. **Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan** yaitu sinkronisasi intervensi kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui penyamaan persepsi tentang indikator kemiskinan, data base jumlah penduduk miskin, sinkronisasi penetapan target dan sasaran program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui program khusus seperti Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM) dan program lainnya yang menjadi program prioritas pemerintah daerah.

b. **Pembangunan daerah perbatasan** diarahkan pada terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis termasuk di dalamnya wilayah perbatasan dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang terintegrasi dan sinergis. Arah kebijakan mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), dengan memperhatikan:

1. Aspek Hukum Internasional, melalui pembangunan prasarana dan sarana, penempatan sumber daya manusia dan penerbitan regulasi yang memiliki fungsi pada kegiatan-kegiatan keimigrasian, kepabeanan dan karantina; pembuatan pos satu atap yang memadukan kegiatan-kegiatan keimigrasian, kepabeanan dan karantina; penuntasan kesepakatan batas-batas negara baik di daratan maupun di perairan; pengembangan aktifitas pada beberapa pulau terluar, sebagai lambang keberadaan NKRI
2. Aspek Pertahanan Keamanan, melalui pembangunan prasarana dan sarana serta penempatan sumber daya manusia yang memiliki fungsi pada kegiatan-kegiatan

pertahanan dan keamanan baik di darat, laut maupun udara;

3. Aspek Pengembangan Wilayah, melalui penataan kawasan dan tata guna tanah, pengembangan permukiman dan prasarana Wilayah, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Sosial,

4. Koordinasi secara intensif dan komprehensif, baik lintas kewenangan maupun lintas sektoral/ pemangku kepentingan maupun lintas negara, untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan evaluasi.

c. **Pembangunan daerah kepulauan** diarahkan untuk:

1. Membuka keterisolasian wilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar.
2. Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di antar pulau dalam daerah dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan produksi perikanan melalui pendekatan usaha efisiensi penangkapan dan penerapan teknologi dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menumbuhkan industri pengolahan yang berbasis pada sumberdaya pesisir yang mampu menyerap tenaga kerja.
4. Meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar dan terdepan.

d. **Pembangunan daerah rawan bencana.** Kebijakan pembangunan diarahkan untuk :

1. Memperkuat perangkat regulasi dan kelembagaan sisitem mitigasi bencana
2. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini terhadap bahaya bencana alam dan bencana sosial
3. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah provinsi dengan pusat dan kabupaten/kota dalam sinkkronisasi upaya mitigasi bencana.
4. Meningkatkan upaya revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial ekonomi di daerah pasca bencana.

"Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, adil dan demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"

DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN

Pemantapan Kualitas Pendidikan

Pembangunan Kesehatan

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Infrastruktur

Pembenahan Sistem Hukum (Daerah) dan Keadilan

Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan

Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan, Kesejahteraan Anak dan Partisipasi Pemuda

Agenda Khusus: Penanggulangan Kemiskinan; Penanganan Daerah Perbatasan; Pengembangan Provinsi Kepulauan; Penanganan Daerah Rawan Bencana

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri, Juli 2008

Pelantikan Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Juli 2008

1. APBD PROVINSI

APBD Provinsi merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk mencapat target-target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2009-2013. Untuk mencapai hasil yang optimal maka setiap pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan harus sejalan dengan kebijakan penganggaran yang berpihak pada rakyat. Berdasarkan harapan tersebut maka analisis pembiayaan dilakukan berdasarkan pola penganggaran, kecenderungan penganggaran, dan peningkatan barang modal untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

1.1. Pola Belanja APBD Provinsi

Pola belanja yaitu suatu kondisi riil pengalokasian anggaran berdasarkan jenis Belanja Tidak Langsung atau *belanja yang dianggarkan* ***tidak terkait secara langsung*** *dengan pelaksanaan program dan kegiatan* dan Belanja Langsung atau *belanja yang dianggarkan* ***terkait secara langsung*** *dengan pelaksanaan program dan kegiatan.*

Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berdasarkan mata anggaran secara akumulatif pada masing-masing SKPD sebagaimana tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pola Belanja APBD Provinsi NTT Tahun 2009

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)	(%)
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**530.065.465.400**	**51,63**
1	Belanja Pegawai	347.763.137.000	33,87
2	Hibah	5.025.000.000	0,49
3	Bantuan Sosial	46.641.892.900	4,54
4	Belanja Bagi Hasil Prov/Kab/Kota/Desa	62.210.698.000	6,06
5	Bantuan Keuangan Prov/Kab/Kota/Desa	57.424.737.500	5,59
6	Belanja Tidak Terduga	11.000.000.000	1,07
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**496.557.909.653**	**48,37**

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	45.564.709.030	4,44
2	Belanja Barang/Jasa	282.838.037.091	27,55
3	Belanja Modal	168.155.163.532	16,38
	JUMLAH A + B	**1.026.623.375.053**	**100**

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

Berdasarkan pola belanja APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum dalam kerangka mewujudkan anggaran dengan paradigma baru penganggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) sebagai berikut:

a.Belanja Tidak Langsung

Dalam APBD Provinsi TA.2009, Belanja Tidak Langsung yang jumlahnya sebesar Rp. 530.065.465.400 untuk 6 komponen belanja, yaitu untuk belanja pegawai sebesar Rp.347.763.137.00 atau 33,87% dan lainnya merupakan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Desa/Kelurahan, belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Desa/Kelurahan serta belanja tidak terduga. Jumlah bantuan keuangan diantaranya untuk beasiwa, bantuan desa dan bantuan ekonomi nilainya cukup besar yaitu Rp. 57.424.737.500 atau 5,59% dari total Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi NTT. Dari gambaran penganggaran tersebut menunjukkan bahwa Belanja Aparatur mengambil porsi terbesar dalam Belanja Tidak Langsung.

b.Belanja Langsung

Belanja Langsung dengan nilai Rp. 496.557.909.653 untuk 3 komponen belanja, yaitu untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp. 450.993.200.623 atau 43,93% dari total Belanja Langsung APBD Provinsi NTT, dan belanja pegawai sebesar 4,44 %.

Berdasarkan keseluruhan komponen belanja, maka total belanja murni aparatur pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mencapai 38,31% dari total APBD Provinsi. Atas dasar komposisi komponen belanja dimaksud maka komitmen menekan belanja aparatur dan mendorong

pengeluaran untuk belanja publik dapat terpenuhi dengan komposisi; belanja aparatur sebesar 38,31% dan belanja publik sebesar 61,69%. Dengan komposisi anggaran publik lebih besar dari anggaran aparatur mengindikasikan terpenuhinya komitmen paradigma penganggaran pembangunan untuk mendorong belanja publik lebih besar dari belanja aparatur.

1.2. Kecenderungan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja, kecenderungannya sebagai berikut; (1) Belanja pegawai 38,31 %, (2) Belanja barang dan jasa 27,55 %, (3) Belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga 17,76% dan (4) Belanja modal 16,38%.

1.3. Alokasi Belanja APBD Berdasarkan Urusan dan Agenda Pembangunan.

Kecenderungan belanja APBD Provinsi berdasarkan SKPD pengelola yang memiliki kedekatan fungsional dengan urusan dan program/kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel 1.2.

Tabel 1.2 **Alokasi Belanja APBD Provinsi NTT Sesuai Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2009**

NO	BIDANG URUSAN	ALOKASI (Rp)	(%)
A.	**URUSAN WAJIB**	**926.675.282.133**	**90,26**
1.	Pendidikan	57.265.549.125	5,58
2.	Kesehatan, *Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*	109.121.490.232	10,63
3.	Pekerjaan Umum, *Perumahan, Penataan Ruang*	206.465.519.762	20,11
4.	Perencanaan Pembangunan, *Statistik*	13.190.474.500	1,28
5.	Perhubungan	14.051.095.400	1,37
6.	Lingkungan Hidup	6.512.579.600	0,63
7.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2.138.052.500	0,21
8.	Sosial	28.175.476.650	2,74
9.	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	17.387.809.800	1,69
10.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.861.808.000	0,86
11.	Penanaman Modal	3.013.274.900	0,29
12.	Kebudayaan	10.750.144.460	1,05
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	3.834.822.100	0,37
14.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	15.375.395.390	1,50

NO	BIDANG URUSAN	ALOKASI (Rp)	(%)
15.	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, *Pertanahan, Kependudukan dan Capil*	367.787.767.241	35,82
16.	Kepegawaian	21.125.554.200	2,06
17.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.346.832.200	0,81
18.	Kearsipan	4.429.722.800	0,43
19.	Perpustakaan	7.688.082.100	0,75
20.	Komunikasi dan Informatika	11.245.347.665	1,10
21.	Ketahanan Pangan	9.908.483.508	0,97
B.	**URUSAN PILIHAN**	**99.948.092.920**	**9,74**
1.	Pariwisata	6.399.424.460	0,62
2.	Pertanian	51.504.865.100	5,02
3.	Kehutanan	9.906.223.400	0,96
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral	8.697.263.860	0,85
5.	Kelautan dan Perikanan	12.791.516.100	1,25
6.	Perindustrian & Perdagangan	10.648.800.000	1,04
	JUMLAH A + B	**1.026.623.375.053**	**100**

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

Berdasarkan proporsi alokasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan sebagai berikut:

- *Berdasarkan jenis urusan*, dominasi pembiayaan pada urusan wajib yang mencapai nilai sebesar 90,26% dan urusan pilihan hanya 9,74%;
- *Berdasarkan agenda pembangunan*, menunjukkan kecenderungan alokasi pembiayaan terbesar yaitu; (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil 35,82% (2) Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang 20,11% (3) Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 10,63% (4) Pendidikan 5,58%, dan untuk 23 urusan lainnya 23,82%.

1.4. Paket Belanja Langsung

a. Jenis Paket Belanja

Jenis belanja untuk mendukung penyediaan asset dan prasarana sebagai barang modal sebagai berikut:

- **Belanja Barang/Jasa;** berupa belanja barang pakai habis,

bahan/material, obat-obatan, perawatan/pemeliharaan infrastruktur, pakaian dinas dan atributnya, jasa konsultansi (study, penelitian) dan belanja lainnya yang sejenis.

- **Belanja Modal;** yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan maupun untuk masyarakat.

b. Paket Pengadaan Barang dan Jasa

Paket belanja barang dan jasa pemerintah melalui dana APBD Provinsi lokasinya di Provinsi dan tersebar di Kabupaten/Kota merupakan salah satu kegiatan utama yang dapat menambah aset atau pendukung kegiatan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Paket belanja barang dan jasa juga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai peluang kemitraan yang dapat dibangun dengan penyedia barang/jasa untuk membuka lapangan kerja baru.
Dari jumlah Belanja Langsung sebesar Rp. 496.557.909.653 (48,37%) dari total APBD dialokasikan untuk paket Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dengan nilai sebesar Rp. 450.993.200.623 terbagi dalam 347 paket kegiatan yang dikelola oleh 44 SKPD dengan dana sebesar Rp.209.878.991.820,-
Selanjutnya berdasarkan besaran dana, sesuai klasifikasi paket kegiatan dengan dana Rp. 50 juta s/d 100 juta dan paket kegiatan dengan dana di atas Rp.100 juta, komposisinya sebagai berikut:

- ***Belanja Barang/jasa dan Belanja Modal dengan nilai Rp.50 juta s/d Rp.100 juta.*** Jumlah kegiatan sebanyak 111 paket yang dikelola oleh 35 SKPD; 5 SKPD dengan prosentase pengelolaan jumlah paket tertinggi yaitu; 1) Dinas Pekerjaan Umum 12 Paket (10,80%), 2) Dinas Pendapatan dan Asset Daerah 12 Paket (10,80 %), 3) Dinas Pertanian dan Perkebunan 9 paket (8,11%), 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8 Paket (7,21%) 5) Sekretariat DPRD 8 paket (7,21 %). Paket-paket lainnya dikelola 29 SKPD;

- ***Belanja Barang/ jasa dan Belanja Modal dengan nilai di atas Rp.100 juta.*** Jumlah kegiatan sebanyak 236 paket yang dikelola 35 SKPD. 4 SKPD dengan prosentase pengelolaan jumlah paket tertinggi yaitu; 1) Dinas Pekerjaa Umum 129 Paket (54,64%), 2) Dinas Pertanian dan Perkebunan 15 Paket (6,36%), 3) RSU Prof. W.J.Z Yohanes 11 paket (4,66%), 4) Dinas Pendapatan dan Asset Daerah 8 Paket (3,39%). Paket-paket lainnya dikelola 31 SKPD;

2. DANA DEKONSENTRASI

2.1. Pola Belanja Dekonsentrasi

Pola penganggaran yaitu suatu kondisi riil pengalokasian angaran dana Dekonsentrasi berdasarkan mata anggaran. Kondisi proporsi pembiayaan secara akumulatif dan pada masing-masing Sarker untuk pembangunan di provinsi Nusa Tenggara Timur melalui dana Dekonsentrasi sebesar Rp.1.006.962.807.000 sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pola Belanja Dana Dekonsentrasi Tahun 2009

NO	KELOMPOK BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
DEKONSENTRASI		**1,006,962,807,000**	**100**
1	Belanja Pegawai	300,000,000	0.03
2	Belanja Barang/Jasa	133,076,021,000	13.22
3	Belanja Modal	1,038,651,000	0.10
4	Belanja Sosial	872,548,135,000	86.65

Dana Desekonsentrasi dikelola oleh 57 SATKER Perangkat Daerah Provinsi. Pola belanja dana Dekonsentrasi menunjukkan dukungan yang kuat terhadap paradigma penganggaran berbasis *Anggur Merah* karena belanja pegawai sangat kecil yaitu 0,03% dan yang dominan adalah belanja sosial yang mencapai 86,65 % dan belanja barang sebesar 13,22 %.

2.2. Alokasi Belanja Dekonsentrasi Berdasarkan Fungsi/ Urusan

Kecenderungan pembiayaan pembangunan dana Dekonsentrasi berbasis *Anggur Merah* dimana dari 9 urusan/fungsi yang dibiayai didominasi untuk pembangunan pendidikan sebesar 87,25%, Perumahan dan fasilitas umum 25,38% dan pembangunan ekonomi 13,17%, selengkapnya sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2 **Alokasi Belanja Dana Dekonsentrasi di Provinsi NTT Menurut Bidang Urusan/Fungsi Tahun 2009**

NO	BIDANG URUSAN	ALOKASI (Rp)	(%)
DEKONSENTRASI		**1,006,962,807,000**	**100**
1.	Pendidikan	878,557,359,000	87.25
2.	Kesehatan	4,731,915,000	0.47
3.	Penataan Ruang	2,800,000,000	0.28
4.	Perencanaan Pembangunan	790,613,000	0.08
5.	Lingkungan Hidup	500,000,000	0.05
6.	Kependudukan dan Capil	430,850,000	0.04
7.	Sosial	28,620,798,000	2.84
8.	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	3,638,880,000	0.36
9.	Koperasi dan UMKM	3,987,000,000	0.40
10.	Kepemudaan dan Olah Raga	4,000,000,000	0.40
11.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	300,000,000	0.03
12.	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	270,000,000	0.03
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,807,000,000	3.06
14.	Kearsipan	195,322,000	0.02
15.	Perpustakaan	3,640,000,000	0.36
16.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	28,663,003,000	2.85
17.	Kehutanan	3,305,546,000	0.33

NO	BIDANG URUSAN	ALOKASI (Rp)	(%)
18.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1,000,000,000	0.10
19.	Kelautan dan Perikanan	7,919,521,000	0.79
20.	Perdagangan	1,319,000,000	0.13
21.	Perindustrian	1,486,000,000	0.15

2.3. Kecenderungan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja, kecenderungannya adalah Belanja Pegawai 39,37% dan Belanja Publik 60,63%, selengkapnya sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3 — **Kecenderungan Alokasi Belanja Dana Dekonsentrasi di Provinsi NTT Menurut Komponen Belanja Tahun 2009**

NO	KOMPONEN BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
A	**Belanja Pegawai**	**396.425.395.000**	**39.37**
1.	Gaji	261.725.507.000	25.99
2.	Perjalanan Dinas	48.266.639.000	4.79
3.	**Belanja Barang dan Jasa**	**85.829.580.000**	**8.52**
	- Belanja Barang	43.658.661.000	4.34
	- Belanja Jasa	42.170.919.000	4.19
4.	**Belanja Modal:**	**603.668.000**	**0.06**
	- Sarana	558.724.000	0.055
	- Prasarana	44.9445.000	0.004
B	**Belanja Publik**	**610.537.412.000**	**60.63**
1.	**Belanja Modal**	**282.650.000**	**0.03**
	- Sarana	82.897.000	0.01
	- Prasarana	199.753.000	0.02
2.	**Belanja Sosial**	**610.254.762.000**	**60.60**
	- Lembaga	596.326.339.000	59.22
	- Masyarakat	13.928.423.000	1.38
	Jumlah A + B	**1,006,962,807,000**	100

3. DANA TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Pola Belanja Dana Tugas Pembantuan

Kondisi proporsi pembiayaan secara akumulatif dan pada masing-masing Sarker untuk pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dana Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp. 45.391.322,000 sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1 — **Pola Belanja Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2009**

NO	KELOMPOK BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
TUGAS PEMBANTUAN (PROVINSI)		**45,391,322,000**	**100**

NO	KELOMPOK BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	-	-
2	Belanja Barang/Jasa	25,355,962,000	55.86
3	Belanja Modal	14,237,427,000	31.37
4	Belanja Sosial	5,797,933,000	12.77

Tugas Pembantuan Provinsi dilaksanakan oleh 13 SATKER Perangkat Daerah Provinsi. Pola belanja dana Tugas Pembantuan Propvinsi menunjukkan dukungan yang kuat terhadap paradigma penganggaran berbasis *Anggur Merah* karena tidak ada alokasi belanja pegawai. Dominan belanja adalah belanja barang yang mencapai 55,86%, belanja modal 31,37% dan belanja sosial sebesar 12,77%.

3.2. Alokasi Belanja Tugas Pembantuan Berdasarkan Fungsi/ Urusan

Kecenderungan belanja dana Tugas Pembantuan untuk mendukung Delapan Agenda Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi NTT dengan paradigma pembiayaan pembangunan berbasis *Anggur Merah,* dimana dari 5 fungsi/urusan yang dibiayai didominasi untuk Pekerjaan Umum sebesar 50,07%, Kelautan dan Perikanan sebesar 17,74% serta Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebesar 13,91%. Selengkapnya sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2 **Alokasi Belanja Dana Tugas Pembantuan di Provinsi NTT Menurut Bidang Urusan/Fungsi Tahun 2009**

NO	BIDANG URUSAN	ALOKASI (Rp)	(%)
TUGAS PEMBANTUAN (PROVINSI)		**45,391,322,000**	**100**
1.	Pekerjaan Umum	22,728,688,000	50.07
2.	Sosial	2,358,010,000	5.19
3.	Ketenagakerjaan dan		

NO	BIDANG URUSAN	ALOKASI (Rp)	(%)
	Ketransmigrasian	6,312,250,000	13.91
4.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	5,942,052,000	13.09
5.	Kelautan dan Perikanan	8,050,322,000	17.74

Berdasarkan alokasi belanja tersebut pada tabel 3.2, mengindikasikan pentingnya belanja Tugas Pembantuan dalam pembangunan.

3.3. Kecenderungan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja Tugas Pembantuan, kecenderungannya adalah Belanja Pegawai 45,01% dan Belanja Publik 54,99%, selengkapnya sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.3 **Kecenderungan Alokasi Belanja Dana Tugas Pembantuan di Provinsi NTT Menurut Komponen Belanja Tahun 2009**

NO	KOMPONEN BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
A	**Belanja Pegawai**	**20.431.642.000**	**45,01**
1.	Gaji	-	0
2.	Perjalanan Dinas	4.581.291.000	10,09
3.	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.162.371.000**	
	- Belanja Barang	7.235.631.000	15,94
	- Belanja Jasa	2.926.758.000	6,45
4.	**Belanja Modal:**	**5.687.980.000**	
	- Sarana	670.600.000	1,48
	- Prasarana	5.017.380.000	11,05
B	**Belanja Publik**	**24.959.680.000**	**54,99**
1.	**Belanja Modal**	**19.561.247.000**	**42,87**
	- Sarana	1.365.000.000	3,00
	- Prasarana	18.097.247.000	39,87
2.	**Belanja Sosial**	**5.498.433.000**	**12,12**
	- Lembaga	234.000.000	0,52
	- Masyarakat	5.264.433.000	11,6
	Jumlah A + B	**45.391.322.000**	**100**

4. DANA KANTOR DAERAH

4.1. Pola Belanja Dana Kantor Daeerah

Alokasi dana Kantor Daerah untuk pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 sebesar Rp 1.934.097.797.000 dengan pola belanja sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1 **Pola Belanja Dana Kantor Daerah di Provinsi Tahun 2009**

NO	KELOMPOK BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
KANTOR DAERAH		**1,934,097,797,000**	**100**
1	Belanja Pegawai	867,447,643,000	44.85
2	Belanja Barang/Jasa	618,537,574,000	31.98
3	Belanja Modal	335,975,682,000	17.37
4	Belanja Sosial	112,136,898,000	5.80

Dana Kantor Daerah dikelola oleh 313 SATKER Perangkat Vertikal di Daerah, dengan pola belanja yang menunjukkan adanya dukungan terhadap paradigma penganggaran berbasis Anggur Merah, karena Belanja Sosial hanya mencapai 5,80% dan Belanja Modal 17,37%, sedangkan Belanja Pegawai 44,85 % dan Belanja Barang mencapai 31,98 %.

4.2. Alokasi Belanja Dana Kantor Daerah

Alokasi belanja dana kantor daerah untuk mendukung 8 agenda pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD sebagaimana tabel 4.2, dimana dari fungsi/urusan yang dibiayai didominasi untuk fungsi/urusan; 1) Keamanan sebesar 25,91%, 2) Kehutanan 25,91%, 3) Perhubungan 14,39%.

Tabel 4.2 **Alokasi Belanja Dana Kantor Daerah di Provinsi NTT Menurut Komponen Belanja Tahun 2009**

NO	BIDANG URUSAN	ALOKASI (Rp)	(%)
KANTOR DAERAH		**1,934,097,797,000**	**100**
1.	Keamanan (Kepolisian)	501,118,923,000	25.91
2.	Yustisi	196,076,812,000	10.14
3.	Moneter dan Fiskal Nasional	83,797,413,000	4.33
4.	Agama	258,799,413,000	

NO	BIDANG URUSAN	ALOKASI (Rp)	(%)
			13.38
5.	Pendidikan	273,855,956,000	14.16
6.	Kesehatan	47,937,794,000	2.48
7.	Perhubungan	278,317,993,000	14.39
8.	Pertanahan	61,242,937,000	3.17
9.	KB dan Keluarga Sejahtera	18,619,601,000	0.96
10.	Sosial	9,549,023,000	0.49
11.	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	6,508,125,000	0.34
12.	Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	32,468,933,000	1.68
13.	Statistik	46,290,622,000	2.39
14.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	42,345,779,000	2.19
15.	Kehutanan	501,118,923,000	25.91
16.	Kelautan dan Perikanan	196,076,812,000	10.14

4.3. Kecenderungan Belanja Dana Kantor Daerah

Berdasarkan jenis belanja, kecenderungannya adalah Belanja Pegawai 84,08% dan Belanja Publik 15,92%, selengkapnya sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3 **Kecenderungan Alokasi Belanja Dana Kantor Daerah di Provinsi NTT Menurut Komponen Belanja Tahun 2009**

NO	KOMPONEN BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
A	**Belanja Pegawai**	**1.626.285.619.000**	**84.08**
1.	Honorarium	14.380.412.000	0.74
	Gaji	857.938.871.000	44.36
2.	Perjalanan Dinas	111.603.886.000	5.77
3.	Belanja Barang dan Jasa	452.839.721.000	23.41
	- Belanja Barang	411.630.734.000	21.28
	- Belanja Jasa	41.208.987.000	2.13
4.	**Belanja Modal:**	**189.519.457.000**	**9.80**
	- Sarana	83.717.836.000	4.33
	- Prasarana	105.801.621.000	5.47
B	**Belanja Publik**	**307.812.179.000**	**15.92**
1.	**Belanja Modal**	**193.862.787.000**	**10.02**
	- Sarana	30.728.011.000	1.59
	- Prasarana	163.134.775.000	8.43
2.	**Belanja Sosial**	**113.949.392.000**	**5.89**

NO	KOMPONEN BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
	- Lembaga	107.063.992.000	5.54
	- Masyarakat	6.885.400.000	0.36
	Jumlah	**1,934,097,797,000**	100,00

5. DANA KANTOR PUSAT

5.1. Pola Belanja Dana Kantor Pusat

Jumlah dana pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dana Kantor Pusat sebasar Rp. 1.237.308.602.000 dengan pola belanja sebagaimana table 5.1.

Tabel 5.1 **Pola Belanja Dana Kantor Pusat di Provinsi NTT Tahun 2009**

NO	KELOMPOK BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
KANTOR PUSAT		**1,237,308,602,000**	**100**
1	Belanja Pegawai	279,270,183,000	22.57
2	Belanja Barang/Jasa	111,446,290,000	9.01
3	Belanja Modal	777,050,629,000	62.80
4	Belanja Sosial	69,541,500,000	5.62

Program/kegiatan Kantor Pusat dilaksanakan oleh 38 SATKER Kantor Pusat di Daerah. Pola belanja Dana Kantor Pusat menunjukkan dukungan yang kuat terhadap paradigma penganggaran berbasis *Anggur Merah* karena Belanja Modal mencapai 62,80% dan Belanja Sosial mencapai 5,62%, sementara Belanja Pegawai 22,57% dan Belanja Barang/jasa mencapai 9,01%.

5.2. Alokasi Belanja Dana Kantor Pusat

Alokasi pembiayaan pembangunan berbasis Anggur Merah dana Kantor Pusat dimana hanya membiayai 7 fungsi/urusan dengan dominasi pembiayaan untuk Pekerjaan Umum sebesar 59,09%, Pertahanan 20,95%, Energi dan Sumber Daya Mineral 16,51% dan Perhubungan 2,78% sebagaimana tabel 5.2.

Tabel 5.2	Alokasi Belanja Dana Kantor Pusat di Provinsi NTT Menurut Komponen Belanja Tahun 2009

NO	BIDANG URUSAN	ALOKASI (Rp)	(%)
D. KANTOR PUSAT		**1,237,308,602,000**	**100**
1.	Pertahanan	259,154,307,000	20.95
2.	Pekerjaan Umum	731,176,695,000	59.09
3.	Perumahan		-
4.	Perhubungan	34,452,033,000	2.78
5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		-
6.	Komunikasi dan Informatika	8,288,354,000	0.67
7.	Energi dan Sumber Daya Mineral	204,237,213,000	16.51

5.3. Kecenderungan Belanja Dana Kantor Pusat

Berdasarkan jenis belanja, kecenderungannya adalah Belanja Pegawai 27,99% dan Belanja Publik 72,01%, selengkapnya sebagaimana tabel 5.3.

Tabel 5.3	Kecenderungan Alokasi Belanja Dana Kantor Pusat di Provinsi NTT Menurut Komponen Belanja Tahun 2009

NO	KOMPONEN BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
A	**Belanja Pegawai**	**346.284.799.000**	**27.99**
1.	Honorarium	9.427.149.000	0.76
	Gaji	266.268.506.000	21.52
2.	Perjalanan Dinas	14.637.114.000	1.18
3.	Belanja Barang dan Jasa	42.991.621.000	3.47
	- Belanja Barang	28.378.532.000	2.29
	- Belanja Jasa	14.613.089.000	1.18
4.	Belanja Modal:	12.960.409.000	1.05
	- Sarana	2.581.436.000	0.21
	- Prasarana	10.378.973.000	0.84
B	**Belanja Publik**	**891.023.803.000**	**72.01**
1.	**Belanja Modal**	**813.135.601.000**	**65.72**
	- Sarana	205.554.832.000	16.61
	- Prasarana	607.580.769.000	49.11
2.	**Belanja Sosial**	**77.888.202.000**	**6.29**

NO	KOMPONEN BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
	- Lembaga	77.888.202.000	6.29
	- Masyarakat	-	-
	Jumlah A + B	**1,237,308,602,000**	**100**

6. KECEDERUNGAN BELANJA APBN

Berdasarkan analisis terhadap dana APBN untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang terbagi dalam dana Derkonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.223.760.528.000, akumulasi jenis belanja didominasi untuk Belanja Aparatur sebesar 56,30% dan Belanja Publik 43,70% sebagaimana tabel 6.

Tabel 6 **Kecenderungan Alokasi Belanja APBN di Provinsi NTT Menurut Komponen Belanja Tahun 2009**

NO	KOMPONEN BELANJA	ALOKASI (Rp)	(%)
A	**Belanja Pegawai**	2,377,802,908,463	**56.30**
1.	Honor/lembur	23,775,185,801	0.56
	Gaji	1,381,202,157,008	32.70
2.	Perjalanan Dinas	178,266,327,249	4.22
3.	Belanja Barang dan Jasa	587,717,652,394	13.91
	- Belanja Barang	486,836,827,364	11.53
	- Belanja Jasa	100,880,825,030	2.39
4.	Belanja Modal:	206,841,586,012	4.90
	- Sarana	86,628,397,751	2.05
	- Prasarana	120,213,188,261	2.85
B	**Belanja Publik**	1,845,957,619,537	**43.70**
1.	Belanja Modal	1,035,500,931,945	24.52
	- Sarana	240,135,298,854	5.69
	- Prasarana	795,365,633,091	18.83
2.	Belanja Sosial	810,456,687,592	19.19
	- Lembaga	784,423,643,053	18.57
	- Masyarakat	26,033,044,539	0.62
	Jumlah	**4.223.760.528.000**	**100,00**

6.1. Paket Belanja APBN

Jenis belanja untuk mendukung penyediaan asset dan prasarana sebagai barang modal sebagai berikut:

- **Belanja Barang/Jasa;** berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, obat-obatan, perawatan/ pemeliharaan infrastruktur, pakaian dinas dan atributnya, jasa konsultansi (study, penelitian) dan belanja lainnya yang sejenis.
- **Belanja Modal;** yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan maupun untuk masyarakat.

Paket belanja barang dan jasa pemerintah melalui dana APBN lokasinya di Provinsi dan tersebar di Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang dapat menambah asset atau pendukung kegiatan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Paket belanja barang dan jasa juga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai peluang kemitraan yang dapat dibangun dengan penyedia barang/jasa untuk membuka lapangan kerja baru. Dari belanja APBN terdapat 470 jenis paket pengadaan barang dan jasa yang diperinci sebagai berikut:

- Belanja Barang/jasa dana Dekonsentrasi sebanyak 77 paket
- Belanja Barang/jasa dana Tugas pembantuan 17 paket
- Belanja Barang dan jasa dana Kantor Daerah 66 paket
- Belanja Barang dan jasa dana Kantor Pusat sebanyak 310 paket

7. APBD DAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan didanai oleh APBD Kabupaten/Kota, disamping itu didukung pula oleh sumber pendanaan Tugas Pembantuan Kabupaten. Pola dan kecenderungan pembiayaan kedua sumber dana tersebut sebagai berikut:

7.1. Tugas Pembantuan Kabupaten

Melalui 173 DIPA Tugas Pembantuan untuk 20 Kabupaten se Provinsi NTT, dialokasikan dana sebesar Rp. 198.097.979.000,- dengan Pola Belanja sebagai berikut: 1) belanja barang Rp.58.002.675.000; 2) belanja modal Rp.41.894.683.000; 3) belanja bantuan sosial Rp.98.200.621.000;

7.2. APBD Kabupaten/Kota

Pencapaian target dalam RPJMD Provinsi NTT juga didukung melalui pelaksanaan program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota. Dalam Tahun 2009, Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi dana DAU sebesar Rp. 5.552.970.000 disamping sumber dana lainnya

yaitu dana Tugas Pembantunan Kabupaten, DAK serta PAD. Total APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp. 8.056.271.746.229,32 yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung Rp. 4.215.716.429.577,65 atau 52,33% dan Belanja Langsung 3.840.555.316.651,67 atau 47,67%.

Terdapat 3 Kabupaten yang besaran APBD-nya di atas Rp. 500 milyar, yaitu; 1) Kabupaten Kupang, 2) TTS dan 3) Belu. Sedangkan Kabupaten yang besaran APBD-nya di bawah 500 milyar, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Manggarai Timur. Komposisi APBD serta jenis belanja masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tabel 7.1.

Tabel 7.1	Jumlah dan Komposisi Jenis Belanja APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi NTT Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp.)		Jumlah (Rp)
		Tidak Langsung	Langsung	
Kupang	533.971.608.503	344.661.168.303	190.597.152.950	535.258.321.253
Kota Kupang	477.847.060.123	295.470.763.891	204.179.508.775	499.650.272.666
T T S	511.566.180.391	325.564.915.145	191.230.024.972	516.794.940.117
T T U	395.973.240.878	220.827.488.609	219.848.572.210	440.676.060.819
Belu	519.463.313.417	299.541.432.652	247.704.631.538	547.246.064.190
Alor	371.939.170.464	228.642.716.034	155.345.202.506	383.987.918.540
Flotim	431.803.787.391	260.618.064.803	220.547.471.204	481.165.536.007
Sikka	414.650.000.000	281.655.868.876	188.444.131.123	470.100.000.000
Ende	436.426.837.972	301.899.254.969	134.527.583.003	436.426.837.972
Ngada	347.888.886.527	170.207.792.417	216.514.336.526	386.722.128.943
Manggarai	376.883.745.448	204.347.114.530	188.875.322.052	393.222.436.582
Sumba Timur	451.511.895.000	246.664.933.500	250.087.356.595	496.752.290.095
Sumba Barat	317.872.322.760	125.508.016.625	190.863.506.135	316.371.522.760
Lembata	310.531.562.435	156.457.298.786	167.875.342.099	324.332.640.885
Rote Ndau	288.615.523.207	121.234.299.957	187.969.824.290	309.204.124.247
Manggarai Barat	363.150.154.590	157.405.309.212	236.256.056.499	393.661.365.711
Sumba Barat Daya	301.421.886.812	122.075.478.818	176.851.459.152	298.926.937.970
Sumba Tengah	252.085.300.469	82.487.451.438	181.421.299.515	263.908.750.953

Nagekeo	290.916.683.986	151.381.476.186	154.161.069.149	305.542.545.335
Manggarai Timur	246.865.523.600	119.065.584.825	137.255.466.359	256.321.051.184
Jumlah Kab/Kota	7.641.384.683.973 *(414.887.062.256)*	4.215.716.429.577	3.840.555.316.651	8.056.271.746.229

Selanjutnya prosentase jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung pada APBD Kabupaten/Kota dikatagorikan dalam 4 klasifikasi sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan rasio belanja tidak langsung dengan belanja langsung di bawah 0,75 yaitu: Kabupaten Ende 0,45; Kabupaten Kupang 0,55; Kabupaten TTS 0,59; Kabupaten Sikka 0,67 dan Kabupaten Alor 0,68.
2. Kabupaten dengan rasio belanja tidak langsung dengan belanja langsung 0,75 s/d 1,0 yaitu: Kabupaten Belu 0,83; Kabupaten Flotim 0,85; Kabupaten Manggarai 0,92; dan Kabupaten TTU 1,0.
3. Kabupaten dengan rasio belanja tidak langsung dengan belanja langsung di atas 1,0 s/d 2,0 yaitu: Kabupaten Sumba Timur 1,01; Kabupaten Nagekeo 1,02; Kabupaten Manggarai Timur 1,15; Kabupaten Ngada 1,27; Kabupaten Sumba Barat Daya 1,45; Kabupaten Manggarai Barat 1,50; Kabupaten Sumba Barat 1,52 dan Kabupaten Rote Ndao 1,55.
4. Kabupaten dengan rasio belanja tidak langsung dengan belanja langsung di atas 2,0 yaitu: Kabupaten Sumba Tengah.

Prosentase belanja dan rasio belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung APBD Kabupaten/Kota selengkapnya sebagaimana ttabel 7.2.

Tabel 7.2	Prosentase dan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Belanja (%)		Rasaio Belanja Tdk langsung/ Belanja langsung
		Tidak Langsung	Langsung	
1	Kupang	64,39	35,61	0,55
2	Kota Kupang	59,14	40,86	0,69
3	T T S	63,00	37,00	0,59
4	T T U	50,11	49,89	1,00
5	Belu	54,74	45,26	0,83

6	Alor	59,54	40,46	0,68
7	Flotim	54,16	45,84	0,85
8	Sikka	59,91	40,09	0,67
9	Ende	69,18	30,82	0,45
10	Ngada	44,01	55,99	1,27
11	Manggarai	51,97	48,03	0,92
12	Sumba Timur	49,66	50,34	1,01
13	Sumba Barat	39,67	60,33	1,52
14	Lembata	48,24	51,76	1,07
15	Rote Ndau	39,21	60,79	1,55
16	Manggarai Barat	39,98	60,02	1,50
17	Sumba Barat Daya	40,84	59,16	1,45
18	Sumba Tengah	31,26	68,74	2,20
19	Nagekeo	49,55	50,45	1,02
20	Manggarai Timur	46,45	53,55	1,15
	Jumlah Kab/Kota	**52,33**	**47,67**	**0,91**

Total Belanja Langsung APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT sebesar Rp.**3.**840.555.316.652 untuk pembiayaan 9.456 kegiatan urusan wajib dan 97 kegiatan urusan pilihan. Program belanja langsung sebanyak 5.204 yang terbagi dalam 19.549 kegiatan. Berdasarkan jenis belanja, secara keseluruhan pola Belanja Langsung APBD Kab/kota sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.386.565.760.484,65 (10,06%), 2) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp.1.397.671.779.878,82 (36,39%), 3) Belanja Modal sebesar Rp. 2.056.317.776.288.20 (53,55%).

Pola belanja tersebut mengindikasikan bahwa APBD Kabupaten/kota didominasi untuk belanja modal, disusul belanja barang/jasa dan hanya sebagian kecil untuk belanja pegawai. Pola penganggaran tersebut mengindikasikan adanya kesesuaian jenis pembiayaan pembangunan APBD Kabupaten/Kota dengan paradigma penganggaran pembangunan berbasis Anggur Merah.

Selanjutnya kecenderungan pembiayaan berdasarkan jenis urusan yang ada menunjukkan bahwa pembiayaan kegiatan didominasi oleh kegiatan pada urusan wajib dengan alokasi dana sebesar 89,78%, sedangkan urusan pilihan mendapatkan alokasi dana sebesar 10,22%. Kecenderungan belanja APBD Kabupaten/kota selengkapnya sebagaimana tabel 7.3.

Tabel 7.3	Alokasi Belanja Langsung APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2009

No	Jenis Urusan	Jumlah Dana (Rp.)	(%)
A	URUSAN WAJIB	3.448.114.372.409	89,78
1	Pendidikan	713.567.468.429	18,58
2	Kesehatan	433.236.326.391	11,28
3	Pekerjaan Umum	1.000.752.153.727	26,06
4	Perumahan	14.779.498.366	0,38
5	Penataan Ruang	11.753.454.100	0,31
6	Perencanaan Pembangunan	61.495.109.306	1,60
7	Perhubungan	63.732.975.818	1,66
8	Lingkungan Hidup	46.060.333.871	1,20
9	Pertanahan	4.130.864.800	0,11
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	21.865.681.969	0,57
11	Pemberdayaan Perempuan	14.971.580.250	0,39
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	19.459.330.413	0,51
13	Sosial	23.555.695.271	0,61
14	Tenaga Kerja	10.633.115.493	0,28
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20.715.321.219	0,54
16	Penanaman Modal	5.722.471.400	0,15
17	Kebudayaan	8.223.456.250	0,21
18	Pemuda dan Olah Raga	5.097.482.569	0,13
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	65.674.848.488	1,71
20	Pemerintahan Umum	765.465.567.643	19,93
21	Kepegawaian	5.696.140.050	0,15
22	Ketahanan Pangan	23.413.158.726	0,61
23	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	89.153.728.951	2,32
24	Statistik	305.475.000	0,01
25	Kearsipan	5.002.639.144	0,13
26	Komunikasi dan Informatika	7.923.372.457	0,21
27	Perpustakaan	5.727.122.308	0,15
B	**URUSAN PILIHAN**	**392.440.944.243**	**10,22**
1	Pertanian	188.200.651.175	4,90
2	Kehutanan	37.972.675.390	0,99
3	Energi dan Sumber Daya Mineral	31.910.797.082	0,83
4	Pariwisata	15.707.047.000	0,41
5	Kelautan dan Perikanan	86.028.421.925	2,24
6	Perdagangan	21.606.532.638	0,56
7	Perindustrian	8.040.765.525	0,21
8	Transmigrasi	2.974.053.508	0,08
	JUMLAH	3.840.555.316.652	100,00

8. AKUMULASI DANA PEMBANGUNAN DI NTT TAHUN 2009

Alokasi dana pembangunan di NTT (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang terdiri dari APBD, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dalam kurun waktu 2007 sampai 2009 meningkat cukup signifikan. Dibandingkan dengan tahun 2007, dana pembangunan di Provinsi NTT yang jumlahnya Rp. 6 trilyun, pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi Rp 13,03 triyun atau meningkat 100,25%. Selanjutnya pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi Rp 13,04 trilyun atau naik 8,53% dibanding tahun 2008.

Dalam konteks NKRI, hal ini menunjukkan perhatian dan komit-men Pemerintah Pusat terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah cukup besar, namun dalam konteks otonomi daerah, dimana sebagian besar urusan pemerintahan telah dilimpahkan ke daerah nampak proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diperuntukkan bagi pelaksanaan desentralisasi urusan pemerintahan jumlahnya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Dana Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan maupun yang dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Daerah (instansi vertikal) dan Kantor Pusat (SNVT/Balai/UPT Pusat) di daerah, sebagaimana terlihat pada gambar 1

Gambar 1 Proporsi Dana Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2009

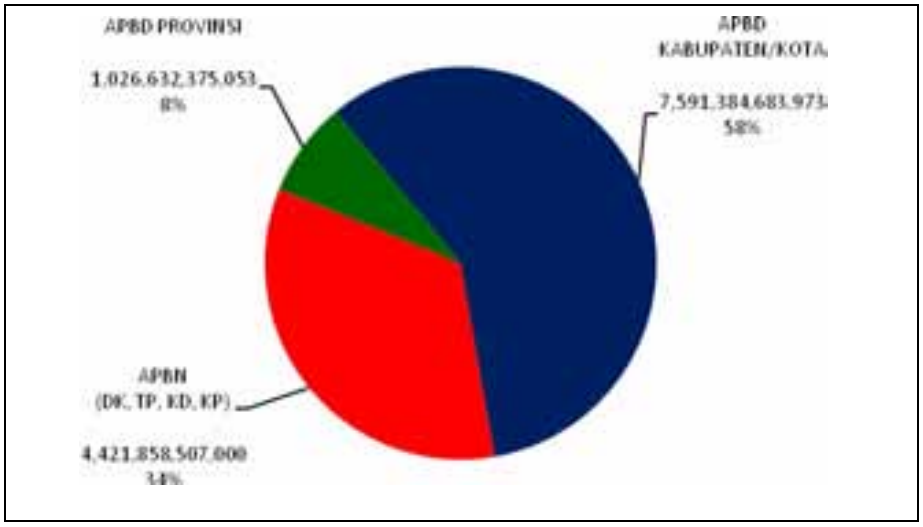

Khusus pada tingkat Provinsi, pada tahun 2009 proporsi alokasi dana Perimbangan dan dana APBN (Dekonsentrasi-DK, Tugas Pembantuan-TP, Kantor Daerah-KD dan Kantor Pusat-KP) kurang berimbang. Dari total dana Perimbangan dan APBN sebesar **Rp 4,9 triyun lebih** hanya **Rp 730 milyar lebih** atau **14,74%** dialokasikan melalui dana Perimbangan, selebihnya sebesar **Rp 4,2 triyun lebih** atau **85,25%** dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi (DK), Tugas Pembantuan (TP), Kantor Daerah (KD) dan Kantor Pusat (KP), sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2	Proporsi Dana Perimbangan dan APBN di Provinsi NTT

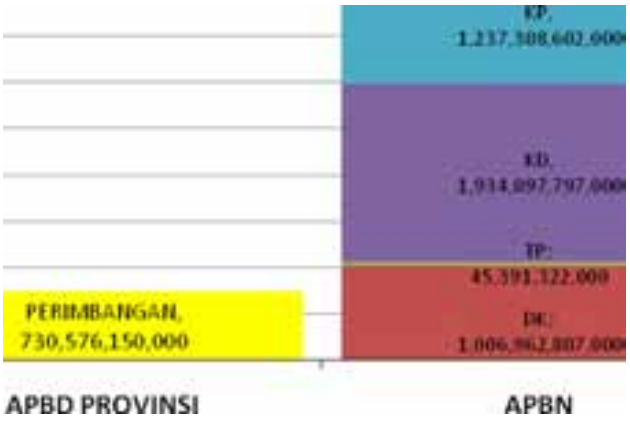

Sumber daya fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Khusus Dana Perimbangan) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK (Provinsi dan Kabupaten/Kota) secara keseluruhan meningkat dari Rp 6,9 trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp 7,7 trilyun atau 10,67% pada tahun 2009. Alokasi dana Perimbangan Provinsi meningkat dari Rp 716 milyar lebih pada tahun 2008 menjadi Rp 730 milyar lebih atau 1,93% pada tahun 2009, sementara alokasi dana Perimbangan Kabupaten/Kota meningkat dari Rp 6,2 trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp 7 trilyun lebih atau 13,10% pada tahun 2009.

Sebagian besar sumber daya fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi mengelola hanya 9,4% sumber daya fiskal ini atau sejumlah Rp 730 milyar lebih dari keseluruhan pendapatan fiskal sebesar Rp 7,7 trilyun lebih. Sisanya yaitu 90,6% atau sebesar Rp 7 trilyun lebih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tren Alokasi Dana Pembangunan Di Provinsi NTT Tahun 2008 – 2009 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8	Tren Alokasi Dana Pembangunan Di Provinsi NTT Tahun 2008 – 2009

NO	SUMBER PENDANAAN	JUMLAH (Rp)	NAIK

		TAHUN 2008	TAHUN 2009	
A.	**PROVINSI**	**4,900,573,407,104**	**5,250,392,903,053**	7.14
1.	**APBD:**	**1,139,424,850,104**	**1,026,632,375,053**	(9.90)
	1. PAD	208,190,685,000	223,847,850,000	7.52
	2. Dana Perimbangan	716,741,315,000	730,576,150,000	1.93
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah	214,492,850,104	72,208,375,053	(66.34)
2.	**Dekon dan Tugas Pembantuan:**	**746,168,446,000**	**1,052,354,129,000**	**41.03**
	1. Dana Dekonsentrasi	707,597,754,000	1,006,962,807,000	42.31
	2. Dana Tugas Pembantuan	38,570,692,000	45,391,322,000	17.68
3.	**Kantor Daerah (Instansi Vertikal)**	**1,737,418,398,000**	**1,934,097,797,000**	**11.32**
4.	**Kantor Pusat (SNVT/ Balai/ UPT)**	**1,277,561,713,000**	**1,237,308,602,000**	**(3.15)**
B.	**KABUPATEN/KOTA**	**7,703,536,310,419**	**8,254,369,725,229**	**7.15**
1.	**APBD:**	**7,315,131,901,419**	**8,056,271,746,229**	**10.13**
	1. PAD	575,977,277,288	544,028,076,727	(5.55)
	2. Dana Perimbangan:	6,213,354,267,322	7,027,472,083,716	13.10
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah	525,800,356,808	227,328,054,658	(7.80)
2.	**Dana Tugas Pembantuan**	**388.404.409.000**	**198.097.979.000**	**(49)**
	JUMLAH NTT (A + B)	**12,604,109,717,523**	**13,504,762,628,282**	**7.15**

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

9. Kemitraan Pembangunan Melalui Dukungan BLN/NGO

No	Donor	Program/Proyek	Tahun Anggaran	Plafon Nilai Hibah
1	Aqua dan AECID	Perbaikan Status Gizi masyarakat rentan di NTT	2007-2009	19.747.658.000
2	AusAID	ANTARA/Medical Supply Management	2006-2009	2.182.800.000
3	AusAID	IASTP III	2008-2011	437.500.000.000
	ECHO	Project Aid To Uprooted People Phase II	2008-2009	19.700.000.000
5	Swisscontact	LED NTT	2008-2010	395.620.000
6	TdH-NL	FIRD,Panti asuhan,Scholarship assistance,FBPPM	2007-2009	4.762.101.380
7	Unicef	CLTS,Konstruksi PAH,Air Bersih dan penyehatan	2007-2009	2.341.744.000

No	Donor	Program/Proyek	Tahun Anggaran	Plafon Nilai Hibah
		lingkungan		
8	AusAID	Peningkatan status gizi perempuan dan anak-anak di kabupaten belu	2004-2009	9.961.000.000
9	AusAID	Perbaikan gizi - NRP	2007-2008	112.000.000.000
10	WVI	Kesehatan,pendidikan, ekonomi	2008-2009	3.997.632.575
11	Robert Christie Foundation	Membantu Masyarakat Raknamo dan Manusak	2006-2009	1.177.311.890
12	AusAID	SADI	2008-2009	266.000.000.000
13	Save The Children	Improving the Quality of teaching Strengthening community links with education,Increased Acces	2006-2009	632.500.000
14	AusAID	Akses dan Kwalitas Pendidikan dasar di NTT		340.000.000
	Jumlah			880.738.367.845

Pemantapan Kualitas Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni dan Angka partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA, Meningkatkan Prosentase Kelulusan, Menurunkan Angka Buta Huruf, meningkatkan proporsi rasio Siswa-Kelas, Siswa-Guru, Siswa-Sekolah dan Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Guru. Target/ sasaran dan pencapaian pembangunan bidang Pendidikan tahun 2008-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel **Sasaran dan Pencapaian Pembangunan Tahun 2009**

Indikator Sasaran	Tahun 2009	
	Sasaran	Capaian
▪ APM SD	89,09	85,86
▪ APM SMP	54,23	64,14
▪ APM SMA	36,67	39,17
▪ APKSMP	69,46	82,84
▪ APK SMA	50,19	54,44
% Tingkat Kelulusan:		
▪ SD	95	95,71
▪ SMP	55	70,25
▪ SMA	72	70,20
▪ SMK	84	88,20
% Angka Butu Huruf:	11	11,43
Rasio Siswa-Kelas:		
▪ SD	1: 38	
▪ SMP	1: 36	
▪ SMA	1 : 33	
▪ SMK	1: 30	
Rasio Siswa-Guru:		
▪ SD	1 : 28	1 : 17
▪ SMP	1 : 36	1 : 15
▪ SMA	1 : 30	1 : 14
▪ SMK	1 : 30	1 : 12
Rasio Siswa Sekolah:		
▪ SD	1 : 156	1 : 168
▪ SMP	1 : 290	1 : 238
▪ SMA	1 : 360	1 : 427
▪ SMK	1 : 360	1 : 332

Peningkatan Pendidikan di NTT Perlu 11 Terobosan

Pembangunan pendidikan nasional yang ada sekarang harus ditingkatkan terus sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Karena itu, pada talun 2009 ini, Depdiknas telah menetapkan 11 terobosan kebijakan secara masal, dan telah menunjukkan hasil-hasil yang positif. Demikian dikatakan Mendiknas RI, Bambang Sudibyo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Gubernur NTT pada upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2009 di Kupang.

Gubernur menyampaikan, bahwa hasil-hasil positif yang sudah dicapai yakni pendanaan pendidikan secara masal, peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik, penerapan TIK untuk pembelajaran dan administrasi, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, serta reformasi perbukuan secara mendasar.

Selanjutnya.....

% Kualifikasi Pendi-dikan Guru D4 - S1:		
▪ SD	5	
▪ SMP	30	
▪ SMA/SMK	54	52,8
Rasio SMA -SMK	216:99	241:114

Selanjutnya, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT senantiasa akan mengupayakan pening-katan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan konprehen-sif, perbaikan rasio peserta didik SMK-SMA, otonomisasi satuan pendidik-an, intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan in-formal untuk menggapai layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan konprehensif.

Dalam kurun waktu tahun 2005-2008, pendanaan pendidikan melalui program BOS, BOS buku, bantuan khusus murid (BKM), Bantuan Operasional Managemen Mutu (BOMM), dan program beasiswa telah menunjukkan hasil dan manfaat signifikan dalam pengembangan mutu pendidikan di tanah air. "Program BOS telah membebaskan sebanyak 70 persen murid SD/MI dan SMP/ MTs dari pungutan biaya operasional dan semua siswa miskin bebas dari pungutan biaya operasional. Selain itu, juga telah tercapai target penuntasan pro-gram wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas) pada tahun 2008.

Untuk bidang pembangunan sarana prasarana pendidikan, pemerintah terus berusaha meningkatkan pembangunan sarana mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. Hingga saat ini, telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh Indonesia sebanyak 6158 unit dan 15 politeknik, ruang kelas baru (RKB) 55.947 ruang, perpustakaan 14.074 unit, serta 11.591 laboratorium. "Selain itu, juga telah direhabilitasi ruang kelas SD/MI sebanyak 284.976 ruang, 29.894 ruang SMP/MTs dan 4.598 ruang SMA/SMK/SLB.

Anak-anak cacat tidak boleh terus bersedih

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya meminta kepada para guru maupun pembina Sekolah Luar Biasa (SLB) atau Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) untuk tidak terus-menerus membuat anak-anak yang mengalami cacat fisik itu bersedih. Namun sebaliknya membuat mereka untuk terus bergem-bira, membuat mereka untuk selalu optimistis dan tetap bersemangat menghadapi masa depan. Hal ini ditegaskan Gubernur Frans Lebu Raya saat memberikan sambutan pada pembukaan lomba prestasi/kreatifitas dan gebyar seni siswa/guru Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK), bertempat di Aula Komodo, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT, Sabtu (2/5). Lomba yang diikuti para siswa SLB/ SDLB kabupaten/kota di NTT ini dilakukan seusai upacara peringatan Hardiknas, di Alun-alun I.H. Doko, Dinas PPO NTT.

(Dinas Kominfo Prov.NTT)

BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009
UNTUK AGENDA PEMANTAPAN KUALITAS PENDIDIKAN

No	KABUPATEN/KOTA	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1.	Kota Kupang	- Guru Kontrak Bidang Studi 99 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	772,200,000
		- Guru TK/SD 36 org x 12 bln x Rp.650.000	280,800,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
2.	Kupang	- Guru Kontrak Bidang Studi 134 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	1,045,200,000
		- Guru TK/SD 51 org x 12 bln x Rp.650.000	397,800,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
3.	Timor Tengah Selatan	- Guru Kontrak Bidang Studi 159 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	1,240,200,000
		- Guru TK/SD 61 org x 12 bln x Rp.650.000	475,800,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	150,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
4.	Timor Tengah Utara	- Guru Kontrak Bidang Studi100 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	780,000,000
		- Guru TK/SD 34 org x 12 bln x Rp.650.000	265,200,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	100,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak	90,000,000

No	KABUPATEN/KOTA	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
		@ Rp. 30.000,- (12 bulan)	
5.	Belu	- Guru Kontrak Bidang Studi100 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	780,000,000
		- Guru TK/SD 34 org x 12 bln x Rp.650.000	265,200,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	100,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
6.	Alor	- Guru Kontrak Bidang Studi 102 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	795,600,000
		- Guru TK/SD 30 org x 12 bln x Rp.650.000	234,000,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
7.	Flores Timur	- Guru Kontrak Bidang Studi 105 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	819,000,000
		- Guru TK/SD 43 org x 12 bln x Rp.650.000	335,400,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	100,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
8.	Sikka	- Guru Kontrak Bidang Studi 65 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	507,000,000
		- Guru TK/SD 38 org x 12 bln x Rp.650.000	296,400,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	100,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
9.	Ende	- Guru Kontrak Bidang Studi 105	819,000,000

No	KABUPATEN/KOTA	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
		org x 12 bln x Rp. 650.000,-	
		- Guru TK/SD 42 org x 12 bln x Rp.650.000	327,600,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	100,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
10.	Ngada	- Guru Kontrak Bidang Studi 78 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	608,400,000
		- Guru TK/SD 24 org x 12 bln x Rp.650.000	187,200,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	100,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
11.	Manggarai	- Guru Kontrak Bidang Studi 63 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	491,400,000
		- Guru TK/SD 18 org x 12 bln x Rp.650.000	140,400,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	100,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
12.	Manggarai Barat	- Guru Kontrak Bidang Studi 15 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	117,000,000
		- Guru TK/SD 31 org x 12 bln x Rp.650.000	241,800,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
13.	Manggarai Timur	- Guru Kontrak Bidang Studi 45 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	351,000,000
		- Guru TK/SD 15 org x 12 bln x Rp.650.000	117,000,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan	540,000,000

No	KABUPATEN/KOTA	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
		MTs Negeri/ Swasta.	
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
14.	Nagekeo	- Guru Kontrak Bidang Studi 55 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	429,000,000
		- Guru TK/SD 15 org x 12 bln x Rp.650.000	117,000,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta.	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
15.	Lembata	- Guru Kontrak Bidang Studi 65 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	507,000,000
		- Guru TK/SD 25 org x 12 bln x Rp.650.000	195,000,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
16.	Rote Ndao	- Guru Kontrak Bidang Studi 42 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	327,600,000
		- Guru TK/SD 24 org x 12 bln x Rp.650.000	187,200,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
17.	Sumba Timur	- Guru Kontrak Bidang Studi 76 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	592,800,000
		- Guru TK/SD 27 org x 12 bln x 650.000	210,600,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000

No	KABUPATEN/KOTA	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
18.	Sumba Barat	- Guru Kontrak Bidang Studi 43 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	335,400,000
		- Guru TK/SD 15 org x 12 bln x 650.000	117,000,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
19.	Sumba Tengah	- Guru Kontrak Bidang Studi 25 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	195,000,000
		- Guru TK/SD 8 org x 12 bln x 650.000	62,400,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
20.	Sumba Barat Daya	- Guru Kontrak Bidang Studi 41 org x 12 bln x Rp. 650.000,-	319,800,000
		- Guru TK/SD 16 org x 12 bln x 650.000	124,800,000
		- Rehabilitasi SD, MI, SMP dan MTs Negeri/ Swasta	540,000,000
		- Penuntasan Percepatan Buta Aksara	50,000,000
		- Beasiswa P2ADT bagi 250 anak @ Rp. 30.000,- (12 bulan)	90,000,000
		Jumlah	**30,461,200,000**

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTT

Gubernur NTT saat meninjau salah satu sekolah

Wakil Gubernur NTT saat menghadiri acara Wisuda S1 STIBA Mentari - Kupang

Pembangunan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan kasus kematian ibu, bayi dan Balita, meningkatkan status gizi balita, meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan usia harapan Hidup. Target/ sasaran dan pencapaian pembangunan bidang Kesehatan tahun 2008-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 **Sasaran dan Pencapaian Pembangunan Tahun 2009**

Indikator Sasaran	Tahun 2009	
	Sasaran	Capaian
Kasus Kematian Ibu (kasus)	230	Menurun
Kasus Kematian Bayi (kasus)	1093	Menurun
Kualitas Lingkungan (% rumah sehat)	28.14	Meningkat
Status gisi Balita (%) ▪ Baik ▪ Kurang ▪ buruk	62.2 30.1 6,7	Meningkat Menurun Menurun
Usia Harapan Hidup	65,6	Meningkat
TFR :	4	Menurun
Peserta KB aktif (%)	58,02	67,06

Jalan Sehat Anlene

Sebanyak 3000 peserta Sabtu (21/3/2009) mengikuti kegiatan jalan sehat yang digelar perusahaan susu Anlene di Kupang. Jalan sehat dengan tema *"Ayo melangkah bersama Anlene 2009"* menempuh jarak sekitar tiga kilo meter. Gubernur NTT melepas jalan sehat yang mengambil start dari Lapangan Mapolda NTT. Turut hadir Kapolda NTT Brigjen Bambang Suedi, Wakil Walikota Kupang Daniel Hurek, Sekda NTT Jamin Habid dan sejumlah pejabat tingkat Provinsi serta Kota Kupang.

Dalam sambutannya sebelum melepas peserta jalan sehat, Gubernur NTT mengatakan, jalan sehat yang dilaksanakan tersebut tidak hanya untuk kesehatan jasmani. "Jalan sehat bersama ini juga semakin merekatkan persaudaraan diantara kita." Gubernur NTT memberi apresiasi khusus kepada penyelenggara, yakni Bano Production dan Pentasindo Enterprise. Ia juga mengharapkan perusahaan susu Anlene dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara rutin di Kupang.

(Dinas Kominfo Prov.NTT)

Pelaksanaan Kegiatan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Gedung IGD RSUD
Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang

Kunjungan Ibu Megawati Soekarnoputri di
Kelas III RSUD Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang

1.1. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin

RSU Johannes menyediakan 144 tempat tidur (44%) dari 329 tempat tidur untuk pasien klas 3. Sementara pasien yang dilayani di klas 3 mengalami peningkatan dari 5.51 % menjadi 6.69% , jumlah pasien miskin yang dilayani di rumah sakit periode Juli 2008 s/d Juni 2009 sebesar ± 30 % dari jumlah kunjungan rumah sakit.

1.2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

- Pelayanan Pasien rujukan ke RSU Johannes mengalami peningkatan dari 57.37% menjadi 70.64% dengan jumlah rujukan terbesar dari puskesmas sebanyak 80.19% diikuti balai pengobatan 11.149% sisanya dari praktek dokter, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.
- Pelayanan korban kekerasan pada perempuan dan anak meningkat dari periode sebelumnya yaitu ± 7 pasien per bulan menjadi 11 pasien per bulan atau meningkat 36, 36% .

- Jumlah dokter spesialis mengalami penurunan dari 35 orang pada juni 2008 menjadi 34 orang. Jumlah jenis dokter spesialis mengalami penurunan dari 13 jenis spesialisasi menjadi 12 jenis spesialisasi. Untuk jenis spesialisasi rehabilitasi medik dan bedah mulut pada periode sebelumnya ada menjadi tidak ada sedangkan jenis spesialisasi bedah umum yang pada periode sebelumnya tidak ada menjadi ada.
- Presentase pasien pulang sembuh mengalami penurunan dari 14.54% menjadi 13.03%
- Persentase rujukan pasien ke RS yang lebih tinggi mengalami penurunan dari 0.39% menjadi 0.34%
- Persentase kematian bagi pasien yang dirawat > 24 jam mengalami kenaikan dari 2.70% menjadi 3.24%
- Presentase pelayanan yang sesuai standar mutu tetap sesuai dengan periode sebelumnya yaitu 75% (12 pelayanan terakreditasi dari 16 pelayanan).

1.3. Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan

- Persentase alat kesehatan yang sesuai standar kebutuhan minimum rumah sakit tetap dari periode sebelumnya yaitu 25.20%.

1.4. Operasional dan Pemeliharaan Penyelenggaraan Pelayanan Medik

- Untuk pemeliharaan alat kesehatan dilakukan kalibrasi alat kesehatan 28.13% dari alat kesehatan yang harus dikalibrasi, mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang hanya 27.16%.

1.5. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit

- Untuk memenuhi kekurangan dr.spesialis maka di datangkan dokter chief senior/spesialis dari pusat pendidikan kedokteran Universitas Udayana, Universitas Sebelas Maret, Universitas Airlangga sebanyak 4 orang yaitu 3 orang chief kebidanan dan kandungan, 1 orang chief anestesi.